



UNIVERSITAS INDONESIA

**Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI)
Sektor Jasa di Indonesia**

TESIS

**WILDAN FIKRI
NPM. 0706178850**

Fakultas Ekonomi
Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi
Ekonomi dan Kebijakan Perdagangan Internasional
Depok
Desember 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

**Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI)
Sektor Jasa di Indonesia**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
dalam menyelesaikan studi pada
Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi**

**WILDAN FIKRI
NPM. 0706178850**

**Fakultas Ekonomi
Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi
Ekonomi dan Kebijakan Perdagangan Internasional
Depok
Desember 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Wildan Fikri
NPM : 0706178850
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Judul Tesis : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masuknya
Foreign Direct Investment (FDI) Sektor Jasa di
Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Pembimbing : Dr. Ferry Irawan

Ketua Penguji : Prof. Dr. Nachrowi D. Nachrowi

Penguji : Dr. Nuzul Achjar




Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Desember 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Wildan Fikri
NPM : 0706178850
Tanda Tangan : 
Tanggal : 9 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Sektor Jasa di Indonesia”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master dalam Ilmu Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ferry Irawan, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Dr. Arindra A. Zainal dan Bapak Dr. Nachrowi Djalal Nachrowi, selaku Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
3. Bapak Drs. Robby Kumenaung, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Perdagangan sebagai pihak yang mengelola beasiswa yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Zainal Arifin, SH. M.Kn., selaku Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan.
5. Bapak, mamih, dan kedua adikku, atas bantuan, dukungan, doa, dan semangat yang diberikan selama masa penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf dosen pengajar, asisten, dan tutor pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.

7. Teman-teman satu bimbingan tesis atas bantuan dan kebersamaannya pada masa penyusunan tesis ini.
8. Teman-teman EKPI 2 atas bantuannya dalam masa penulis menjalani perkuliahan.
9. Seluruh keluarga dan teman-teman saya atas dukungan dan doanya.
10. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini yang tidak dapat saya tulis satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Depok, 9 Januari 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Fikri
NPM : 0706178850
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Departemen : Program Pascasarjana
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) Sektor Jasa di Indonesia” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok Pada tanggal : 9 Januari 2009

Yang menyatakan,

(Wildan Fikri)

ABSTRAK

Nama : Wildan Fikri

Program Studi : Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia

Judul : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) Sektor Jasa di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) Sektor Jasa ke Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengujian dengan metode data panel, dengan observasi pada 21 propinsi di Indonesia, dan periode penelitian adalah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005.

Dari hasil pemilihan model estimasi diketahui bahwa model estimasi adalah dengan menggunakan *random effect model*. Adapun dari hasil regresi dengan menggunakan *random effect model* tersebut didapatkan hasil bahwa PDRB, *Oppennes*, inflasi, dan kondisi sosial-politik memang secara signifikan mempengaruhi arus masuknya FDI sektor Jasa ke Indonesia. Perubahan PDRB, *Oppennes*, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap arus masuknya FDI sektor Jasa ke Indonesia, sedangkan perubahan inflasi akan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap arus masuknya FDI sektor Jasa ke Indonesia.

Klasifikasi JEL : C23, E22, F21

Kata Kunci : 1. *Foreign Direct Investment* (FDI) 4. Indonesia
2. Sektor Jasa
3. Data panel

ABSTRACT

Name : Wildan Fikri
Majoring : Economic Science Studies
Postgraduate Program on Faculty of Economics
University of Indonesia
Titel : Determinants of Foreign Direct Investment (FDI) on Services Sector in Indonesia

This study aims to find out the determinant of Foreign Direct Investment (FDI) on services sector in Indonesia. Methods of analysis used in this research is the panel data methods, with 21 provinces in Indonesia as observation, and the research period is from 2003 until 2005.

The results of the estimation model election, shown that random effect model is used as estimation model. The results from the regression is shown that GDP, oppennes, inflation, and socio-political conditions significantly affect the entry of FDI flows on services sector in Indonesia. Changes in GDP, oppennes, and inflation is positive and significant on the entry FDI flows on services sector in Indonesia, while changes in inflation will be negative and significant effect on the entry of FDI flows on services sector in Indonesia.

JEL Clasification : C23, E22, F21
Keywords : 1. Foreign Direct Investment (FDI) 4. Indonesia
2. Services Sector
3. Panel Data

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis	vi
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	13
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Hipotesa Penelitian	13
1.6 Model Ekonometri	14
1.7 Data Yang Dipakai	15
1.8 Manfaat Penelitian	15
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR	
2.1 Investasi	16
2.2 Foreign Direct Investment (FDI)	17
2.3 Iklim Investasi	20
2.4 Produk Domestik Bruto	21
2.5 Keterbukaan Perdagangan (Trade Oppeness)	22
2.6 Inflasi	22
2.7. Kondisi Sosial-Politik	23
2.8. Sektor Jasa	27
2.9. Penelitian Sebelumnya	28

BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Spesifikasi Model	31
3.2 Sumber Data	32
3.3 Metode Ekonometrika Yang Digunakan	32
3.3.1. Metode Analisis Panel Data	32
3.3.2. Pemilihan Metode Estimasi dalam data Panel	38
BAB 4 SEKTOR JASA	
4.1 Ekonomi Sektor Jasa	40
4.2 Ruang Lingkup Sektor Jasa	41
4.3 Proses penyampaian (<i>Mode of Supply</i>) Jasa	46
4.3 Sektor Jasa dalam Perekonomian Indonesia	47
BAB 5 PEMBAIIASAN DAN ANALISA PENELITIAN	
5.1 Uji Spesifikasi Model	51
5.2 Uji Signifikansi dan Arah Pengaruh Variabel-variabel Bebas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	53
5.3 Pembahasan Hasil Estimasi	54
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Rekomendasi Kebijakan	60
DAFTAR REFERENSI	61
LAMPIRAN	64

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya yang diukur dengan *Gross Domestic Product (GDP)*. Setiap negara di seluruh dunia menggunakan GDP sebagai indikator untuk mengukur tingkat pembangunan ekonominya. Melalui penggunaan GDP sebagai indikator ukuran tingkat pembangunan ekonomi, maka dapat dilihat bahwa semakin maju pembangunan ekonomi suatu negara maka akan semakin besar GDP-nya (baik secara total maupun per-kapita), sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat dengan asumsi pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduknya.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan dana yang cukup besar, sehingga dilakukan upaya untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan, yang diperoleh dari tabungan domestik dan hasil ekspor, sebagai sumber internal dalam negeri, serta pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing, sebagai sumber eksternal dari luar negeri. Ketiga sumber pembiayaan ini memiliki karakteristik dan keterbatasannya sendiri yang juga mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia.

Sumber pembiayaan pertama, adalah tabungan domestik yang diperoleh dari sektor pemerintah dan masyarakat. Tabungan pemerintah adalah tabungan pemerintah dalam APBN, yang merupakan selisih antara penerimaan dari pajak dalam negeri dan pengeluaran rutin, sedangkan tabungan masyarakat merupakan bagian pendapatan yang diterima masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi yang biasanya disimpan di bank. Kedua, pinjaman luar negeri dan penanaman modal yang pada

level penggunaan yang tepat akan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Pinjaman luar negeri adalah aliran modal dari pemerintah negara lain, ataupun badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman, seperti Bank Dunia, ADB, IMF dan lainnya. Aliran modal ini biasanya dalam bentuk pemberian (*grant*) dan pinjaman luar negeri (*loan*). Sedangkan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing ataupun penanam modal dalam negeri untuk melakukan usaha di wilayah suatu negara.

Adapun sumber pembiayaan yang ketiga adalah ekspor, yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari penerimaan hasil ekspor. Penerimaan hasil ekspor ini menjadi penting karena merupakan salah satu upaya pembiayaan pembangunan yang digali untuk menghindari ketergantungan suatu negara terhadap pihak asing dalam membiayai pembangunannya. Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dan penanaman modal dari negara lain pada suatu saat harus dibayarkan kembali dalam jumlah yang lebih besar karena adanya faktor bunga dan laba penanaman modal (Todaro : 2000).

Sebagai sebuah negara berkembang yang sedang membangun, Indonesia membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang diupayakan adalah melalui penanaman modal asing atau *foreign direct investment* (FDI). Saat ini penanaman modal asing merupakan salah satu sumber pembiayaan yang cukup penting di Indonesia. Indonesia tengah menghadapi kebutuhan yang mendesak untuk memacu perekonomian yang saat ini tumbuh dengan lambat. Salah satu program pemerintah untuk memacu perekonomian adalah dengan menarik penanaman modal asing baru, terutama penanaman modal asing yang berorientasi ekspor, untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membina sektor non-migas agar dapat memiliki daya saing yang tinggi di tingkat internasional.

Indonesia, sebagai sebuah negara yang memiliki perekonomian yang pendapatan per-kapitanya masih rendah, yang ingin mengejar perekonomian negara-negara yang berpendapatan lebih tinggi, harus dapat menambah modal dengan kecepatan yang tinggi. Dengan demikian, aktifitas penanaman modal asing adalah

sebuah keniscayaan dalam pembangunan ekonominya, karena dapat meningkatkan modal sebagai biaya pembangunan, menciptakan lapangan usaha dan mengurangi pengangguran, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam pergaulan antar negara yang terdiri dari persaingan dan kerjasama, kesejahteraan rakyat suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan total dan per-kapita, pemerataan pendapatan antar warga, antar daerah dan antar generasi, dan pertumbuhan pendapatan itu dibanding pertumbuhan pendapatan negara-negara lain. Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia perlu memacu perbaikan kesejahteraan dengan lebih cepat daripada negara-negara yang sudah lebih maju dan kaya. Kalau tidak, maka Indonesia tetap sebagai negara yang tertinggal dari negara-negara yang maju dan kaya.

Pertambahan stok modal yang tidak lain dari investasi merupakan sumber yang sangat penting dari pertumbuhan pendapatan. Dalam kurun waktu 1961-2004, GDP Indonesia per-tenaga kerja tumbuh dengan rata-rata 2,6% per tahun. Bagian terbesar dari pertumbuhan itu, yaitu 1,8% atau 69% dari pertumbuhan rata-rata 2,6%, disumbang oleh pertumbuhan modal per-tenaga kerja. Dengan kata lain, penambahan modal yang berkelanjutan adalah sangat penting bagi keberhasilan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Setiap negara berusaha keras untuk membangun akses yang baik untuk mendapatkan modal dari dunia internasional. Demi akses yang lebih baik itulah undang-undang tentang dan kebijakan penanaman modal diperbaharui terus menerus (Rajagukguk : 2006).

Faktor-faktor yang mempengaruhi arus penanaman modal asing ke suatu negara adalah faktor non-politik dan politik. Faktor non-politik berupa besarnya pasar di negara penerima yang diukur dengan GDP, dan pertumbuhan skala pasar yang diukur dengan pertumbuhan GDP. Iklim penanaman modal yang sehat sudah tentu merupakan prasyarat untuk meningkatkan arus modal asing dan ditentukan antara lain oleh faktor-faktor seperti stabilitas politik, sikap terhadap sektor swasta, mutu prasarana fasilitas dan transportasi, serta stabilitas peraturan (Nigh : 1985).

Penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan salah satu bentuk pembiayaan dari luar negeri yang cukup baik karena tidak

merupakan hutang, dan dapat menjadi sarana alih teknologi, pengetahuan tentang proses produksi, dan lainnya, serta secara tidak langsung dapat mendorong meningkatnya pendapatan per-kapita masyarakat dengan melalui penciptaan lapangan kerja yang luas.

Aturan perundang-undangan di Indonesia membagi penanaman modal menjadi dua jenis. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal membagi penanaman modal menjadi dua jenis, yaitu, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Asing (PMA) didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didefinisikan sebagai Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

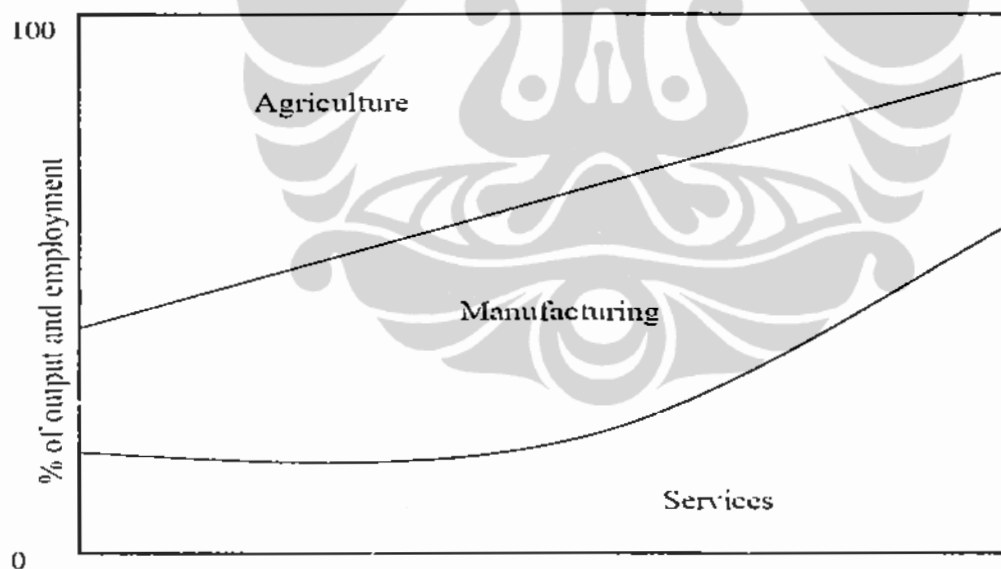
Tujuan utama pemerintah dengan menarik penanaman modal asing adalah untuk memacu perekonomian, dengan harapan penanaman modal asing yang masuk dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membina sektor non-migas agar dapat memiliki daya saing yang tinggi di tingkat internasional. Salah satu sektor non-migas yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sektor jasa.

Secara teoritis, kegiatan ekonomi masyarakat dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) sektor utama yaitu sektor primer yang berbasis pertanian, sektor sekunder dengan basis industri dan sektor tertier yang berbasis jasa.

Fisher (1935) dan Clark (1940), mengemukakan teori mengenai model tiga sektor yang menerangkan perkembangan perekonomian dan evolusi sektor perekonomian. Mereka mengatakan bahwa berbagai sektor ekonomi berkembang alami secara periodik. Pada awal proses pembangunan ekonomi, pertanian adalah sektor yang paling penting. Awalnya, dengan tingkat pengetahuan dan produktivitas masyarakat yang rendah, kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat adalah sektor primer atau sektor pertanian. Ketika terjadi kemajuan dalam

teknik pertanian, produktivitas dan surplus meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya perkembangan dalam sektor sekunder atau sektor manufaktur, yang memproduksi baik peralatan dan juga barang konsumen, untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar dari masyarakat. Ketika kesejahteraan dan potensi produktif masyarakat terus tumbuh, bahkan ketika masyarakat cenderung membutuhkan barang mewah, maka dilakukan penyediaan kebutuhan tersebut para penyedia sektor jasa (sektor jasa). Dari pernyataan Fisher dan Clark tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat evolusi dalam sektor-sektor ekonomi, dimana diawali dengan sektor primer (pertanian), kemudian beralih kepada sektor sekunder (manufaktur), dan akhirnya akan menuju kepada sektor jasa (jasa). Model tiga sektor tersebut dapat dilihat dalam grafik 1.1. :

Grafik 1.1. : Model tiga sektor



Sumber : Gershuny dan Miles

Sejak tahun 1960, ekonomi suatu negara cenderung mengikuti perkembangan pembangunan yang bergeser, dari ketergantungan besar pada pertanian dan pertambangan, kemudian beralih kepada pengembangan industri manufaktur (misalnya mobil, tekstil, kapal, baja) dan akhirnya ke arah sektor-sektor yang berbasis

kepada jasa. Perekonomian negara yang pertama kali memulainya di dunia modern adalah Inggris. Sektor-sektor yang berbasis kepada jasa inilah yang disebut sebagai Ekonomi sektor jasa.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Perubahan yang dihadapi di dalam pembangunan antara lain adalah perubahan komposisi dan struktur permintaan dan produksi, penyerapan tenaga kerja, industrialisasi, urbanisasi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Transformasi ekonomi dan struktur dalam proses pembangunan hanya dapat berjalan jika terjadi proses akumulasi modal, peningkatan kemampuan teknologi, pengembangan sumberdaya manusia dan terbentuknya sistem pasar.

Tantangan utama pembangunan ekonomi yang berkesinambungan jika dilihat dari perspektif sektoral adalah bagaimana mewujudkan proses transformasi pertanian, menuju pada industrialisasi dan perkembangan sektor jasa-jasa.

Negara sedang berkembang dalam proses transformasi ekonominya pada satu tahap akan mengalami fenomena *conditional convergence*, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang awalnya rendah mulai tinggi karena proses industrialisasi yang terjadi melalui akumulasi modal dan penyerapan teknologi luar yang berjalan dengan pesat.

Sebagai negara berkembang, Indonesia tengah mengalami proses industrialisasi yang cukup pesat, paling tidak hingga tahun 1997, sebelum krisis ekonomi mengoreksi berbagai tatanan ekonomi nasional. Dengan semakin dalamnya struktur industrialisasi, maka pertumbuhan tersebut akan dengan sendirinya menurun, sebagaimana yang telah dialami Jepang.

Struktur ekonomi suatu negara dapat dilihat dari peran masing-masing sektor dalam produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi. Salah satu indikator ekonomi yang dapat dijadikan dasar penilaian tersebut adalah Neraca Pembayaran. Berdasarkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi nasional mulai bergeser pada sektor industri dan telah pula mendorong pertumbuhan sektor jasa-jasa.

Bergulirnya proses Industrialisasi dan pertumbuhan jasa-jasa di Indonesia tidak terlepas dari kecenderungan global yang secara mendasar mengubah paradigma pembangunan lama. Proses globalisasi dan era perdagangan bebas itu sendiri menurut Mari Pangestu didorong oleh 2 (dua) faktor yaitu bergulirnya proses liberalisasi secara universal dan terjadinya perubahan teknologi serta internasionalisasi produksi dan distribusi (Pangestu : 1996).

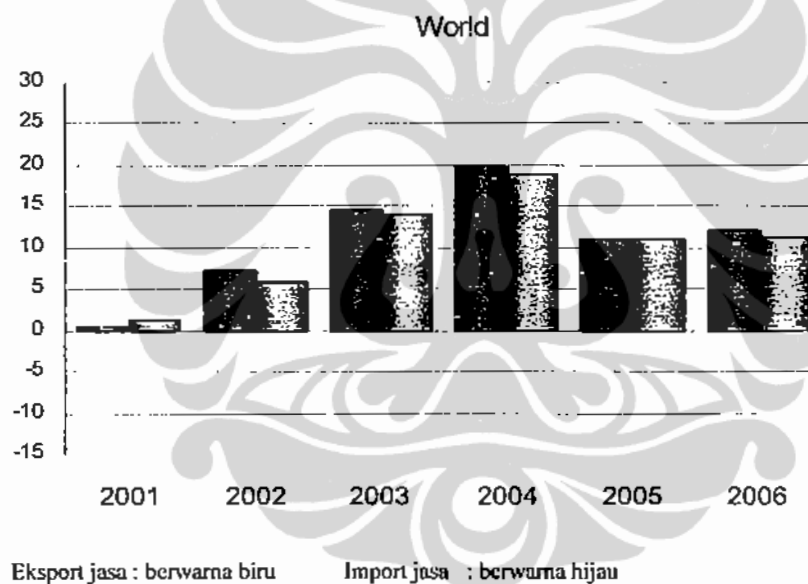
Industri jasa pada saat ini merupakan sektor ekonomi yang sangat besar dan tumbuh sangat pesat. Pertumbuhan tersebut selain diakibatkan oleh pertumbuhan jenis jasa yang sudah ada sebelumnya, juga disebabkan oleh munculnya jenis jasa baru, sebagai akibat dari tuntutan dan perkembangan teknologi. Dipandang dari konteks globalisasi, pesatnya pertumbuhan bisnis jasa antar negara ditandai dengan meningkatnya intensitas pemasaran lintas negara serta terjadinya aliansi berbagai penyedia jasa di dunia. Perkembangan tersebut pada akhirnya mampu memberikan tekanan yang kuat terhadap perombakan regulasi, khususnya pengenduran proteksi dan pemanfaatan teknologi baru yang secara langsung akan berdampak kepada menguatnya kompetisi dalam industri (Lovelock : 2004). Kondisi ini secara langsung menghadapkan para pelaku bisnis kepada permasalahan persaingan usaha yang semakin tinggi. Mereka dituntut untuk mampu mengidentifikasi bentuk persaingan yang akan dihadapi, menetapkan berbagai standar kinerjanya serta mengenali secara baik para pesaingnya.

Dinamika yang terjadi pada sektor jasa terlihat dari perkembangan berbagai industri seperti perbankan, asuransi, penerbangan, telekomunikasi, retail, konsultan dan pengacara. Selain itu terlihat juga dari maraknya organisasi nirlaba seperti LSM, lembaga pemerintah, rumah sakit, perguruan tinggi yang kini semakin menyadari perlunya peningkatan orientasi kepada pelanggan atau konsumen. Perusahaan manufaktur kini juga telah menyadari perlunya elemen jasa pada produknya sebagai upaya peningkatan *competitive advantage* bisnisnya (Hurriyati : 2005).

Sektor jasa merupakan sektor yang diprediksikan akan menjadi *leading sector* di dunia. Sampai saat ini sektor jasa atau perdagangan jasa menunjukkan pertumbuhan yang baik. Dari data yang dimiliki IMF nilai ekspor perdagangan jasa dunia pada

tahun 2000 mencapai lebih dari US\$ 7500 Milyar, sedangkan pada perdagangan barang hanya mencapai US\$ 600 Milyar. Pertumbuhan perdagangan jasa yang lebih cepat dari pertumbuhan perdagangan barang, dimana perdagangan jasa meningkat rata-rata 9%, sedangkan perdagangan barang sebesar 8%. Selain itu tercatat pertumbuhan perdagangan jasa di negara berkembang lebih cepat dibandingkan dengan negara maju (Dit. Binus & PP : 2005). Grafik 1.2. menunjukkan prosentase pertumbuhan nilai ekspor-impor jasa di dunia :

Grafik 1.2. : prosentase pertumbuhan nilai ekspor-impor jasa dunia



(Sumber : www.wto.org)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekspor-impor jasa di dunia menunjukkan kenaikan yang baik, dimana terlihat pertumbuhan yang sangat pesat sejak tahun 2001, dan diprediksikan akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Meningkatnya pertumbuhan pada sektor jasa/jasa menyebabkan sektor ini menjadi sektor yang mendapat perhatian untuk dikembangkan.

Perhatian dunia internasional terlihat dengan dimasukkannya sektor jasa ke dalam perundingan putaran uruguay, yang menghasilkan kesepakatan bahwa

perdagangan jasa merupakan jenis perdagangan yang harus diatur kegiatannya dalam perdagangan internasional. Sehingga pada akhir putaran Uruguay perdagangan jasa dimasukkan ke dalam lampiran *Agreement Establishing The WTO*, yaitu dalam *annex 1b* tentang *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.

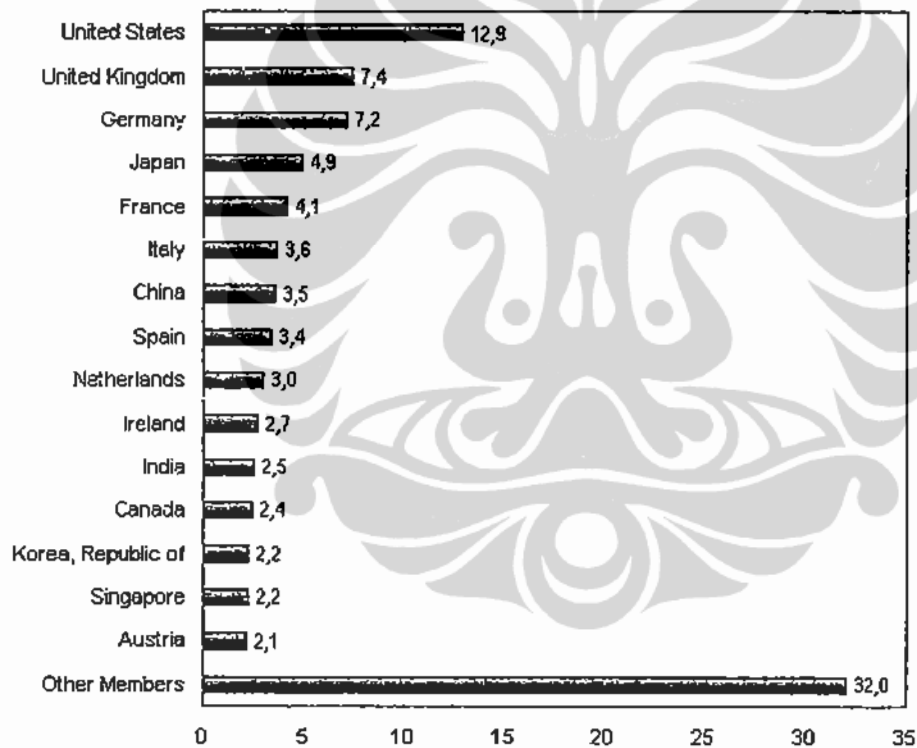
Kesepakatan perdagangan jasa yang dicapai pada putaran Perundingan Uruguay dapat dikatakan merupakan satu-satunya perkembangan penting dalam sistem perdagangan dunia setelah kesepakatan perdagangan barang atau *General Agreement on Trade and Tariff (GATT)*. Persetujuan baru yang tertuang dalam *General Agreement on Trade in Services (GATS)* untuk pertama kalinya menyepakati aturan multilateral berbagai aspek perdagangan jasa internasional, setara dengan apa yang telah dicapai dalam GATT.

GATS mencakup seluruh aspek perdagangan jasa internasional. Hal ini berarti bahwa kesepakatan GATS mencakup sebagian besar faktor-faktor baru pada sebagian besar sektor dalam perdagangan dunia. Sebagaimana GATT, persyaratan yang tertuang akan langsung mempengaruhi peraturan dan perundang-undangan domestik negara anggota mengingat hampir sebagian besar kegiatan perdagangan jasa terjadi secara internal di dalam perekonomian sebuah negara (Dit. Binus & PP : 2006).

Munculnya perhatian terhadap sektor jasa selain dikarenakan pertumbuhannya yang terus meningkat, juga dikarenakan *share* dari negara-negara dunia dalam sektor jasa cukup besar. Hal ini menyebabkan negara-negara dunia (terutama negara-negara maju) merasa berkepentingan agar sektor jasa mendapatkan perhatian khusus dan diperlukan adanya pengaturan khusus berkenaan dengan sektor jasa. Sehingga kemudian sektor jasa dimasukkan ke dalam perundingan Putaran Uruguay, yang

kemudian menghasilkan *General Agreement on Trade in Services* (GATS), yang mengatur tentang perdagangan jasa. Adapun *share* dari negara-negara dunia dalam perdagangan jasa nampak dalam Grafik 1.3. :

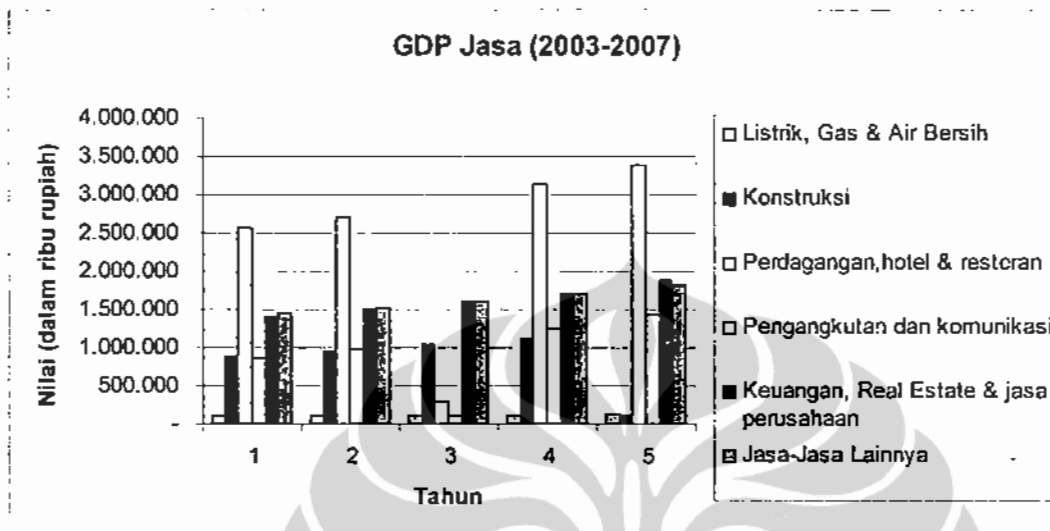
Grafik 1.3. : Share Anggota-anggota WTO dalam Perdagangan Jasa Pada Tahun 2006 (dalam persen)



(Sumber : www.wto.org)

Indonesia sebagai negara anggota WTO dan juga sebagai sebuah negara berkembang yang sedang berusaha memacu pertumbuhan ekonominya memiliki kepentingan untuk mengembangkan sektor jasa. Kepentingan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa *share* sektor jasa dalam GDP Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat dalam grafik 1.4. :

Grafik 1.4. : Sektor jasa dalam GDP Indonesia (2000-2007)

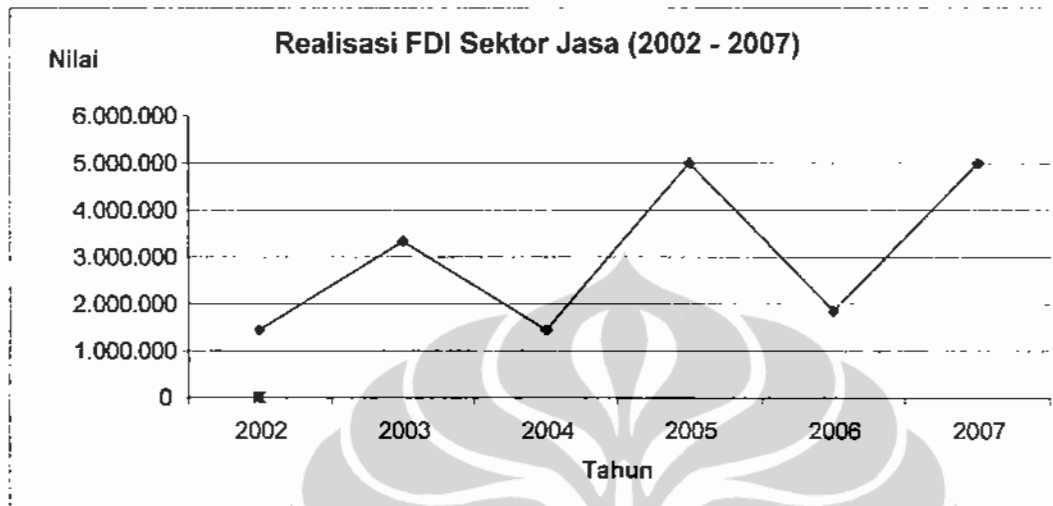


Sumber : BPS (diolah)

Grafik diatas memperlihatkan bahwa sektor jasa mengalami peningkatan yang baik dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa merupakan sektor yang cukup potensial, dan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berkenaan dengan penanaman modal asing atau FDI yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi, sektor jasa merupakan potensi yang cukup potensial untuk menarik masuknya FDI ke Indonesia. Sampai saat pertumbuhan sektor jasa masih naik dan turun dari ke tahun ke tahun, namun mengingat GDP pada sektor jasa merupakan sektor yang terus bertumbuh dengan pesat, maka harus diakui bahwa sektor jasa merupakan peluang yang cukup potensial untuk dapat menarik masuknya FDI ke Indonesia. Grafik 1.5. menunjukkan pertumbuhan dari realisasi penanaman modal asing di sektor jasa :

Grafik 1.5. : Realisasi Foreign Direct Investment (FDI) Sektor jasa di Indonesia



Sumber : BKPM (diolah)

Grafik diatas memperlihatkan bahwa FDI di sektor jasa masih belum menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat, maka perlu diupayakan untuk membuat peningkatan pertumbuhan yang baik pada sektor jasa. Sehingga peningkatan pertumbuhan GDP pada sektor jasa berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan FDI pada sektor jasa.

1.2. Perumusan Masalah

Sektor jasa merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari *share* sektor jasa dalam GDP Indonesia yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka seharusnya sektor jasa di Indonesia menjadi sektor yang diminati oleh para penanam modal asing. Namun berdasarkan data yang didapatkan ternyata *foreign direct investment* (FDI) di sektor jasa menunjukkan pertumbuhan yang naik dan turun, tidak bertumbuh berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan GDP pada sektor jasa. Sehingga terdapat gap antara apa yang seharusnya dan kenyataan yang terjadi.

Dengan mengacu pada latar perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Foreign Direct Investment* (FDI) di sektor jasa dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Apakah PDRB, keterbukaan (openness), inflasi, kondisi sosial-politik berpengaruh terhadap masuknya FDI sektor jasa di Indonesia.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sektor-sektor jasa yang penanaman modalnya berada dalam pembinaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sektor-sektor jasa ini masuk kedalam sektor tersier, yang terdiri dari jasa konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estate dan jasa perusahaan; listrik, gas dan air bersih; serta jasa lainnya.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi masuknya FDI sektor jasa di Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel PDRB, keterbukaan (openness), inflasi, kondisi sosial-politik, terhadap masuknya FDI sektor jasa di Indonesia.

1.5. Hipotesa Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan model matematika sebagai berikut :

$$FDITER = (PDRB, OPEN, INFL, SOSPOL) \dots\dots\dots (1.1)$$

dimana $FDITER$ = FDI sektor jasa pada propinsi-propinsi di Indonesia, $PDRB$ = *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) pada propinsi-propinsi di Indonesia,

OPEN = keterbukaan (openness), INFL = inflasi pada propinsi-propinsi di Indonesia, SOSPOL = indeks kondisi sosial-politik.

Mengacu pada uraian diatas penulis memiliki hipotesis sebagai berikut :

1. *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) pada propinsi-propinsi di Indonesia berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap FDI Sektor Jasa di Indonesia.
2. Keterbukaan (openness), berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap FDI sektor jasa di Indonesia.
3. Inflasi pada propinsi-propinsi di Indonesia, berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap FDI sektor jasa di Indonesia.
4. Indeks kondisi sosial-politik, berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap FDI sektor jasa di Indonesia.

1.6. Model Ekonometri

Adapun model ekonometri yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{LnFDITER}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnPDRB}_{it} + \beta_2 \text{LnOPEN}_{it} + \beta_3 \text{LnINFL}_{it} + \beta_4 \text{LnSOSPOL}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1.2)$$

dimana:

- FDI TER : FDI Sektor Jasa pada propinsi-propinsi di Indonesia
- PDRB : *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) pada propinsi-propinsi di Indonesia
- OPEN : Keterbukaan (openness) pada propinsi-propinsi di Indonesia
- INFL : Inflasi pada propinsi-propinsi di Indonesia
- SOSPOL : Indeks kondisi sosial-politik pada propinsi-propinsi di Indonesia
- ε : error/gallat

1.7. Data yang dipakai

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dari tahun 2003 sampai tahun 2005. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah realisasi FDI sektor jasa pada propinsi-propinsi di Indonesia (selanjutnya disebut FDI jasa Indonesia), data *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) pada propinsi-propinsi di Indonesia (selanjutnya disebut PDRB propinsi), data *share* ekspor-impor yang terdapat dalam *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) pada propinsi-propinsi di Indonesia yang menunjukkan keterbukaan pada masing-masing propinsi tersebut (selanjutnya disebut keterbukaan propinsi), data inflasi pada propinsi-propinsi di Indonesia (selanjutnya disebut inflasi propinsi), indeks kondisi sosial-politik yang menunjukkan tingkat stabilitas sosial-politik pada suatu propinsi (selanjutnya disebut Sosial-Politik propinsi).

1.8. Manfaat Penelitian

Bagi dunia ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur studi empiris tentang *Foreign Direct Investment* (FDI), khususnya dalam sektor jasa di Indonesia. Sedangkan untuk pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk membuat kebijakan ke depan terkait dengan *Foreign Direct Investment* (FDI), khususnya dalam sektor jasa, dan peningkatan kegiatan usaha sektor jasa di Indonesia.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1. Investasi

Investasi di dalam pengertian umum adalah mengorbankan dana yang dikeluarkan pada saat ini untuk mendapatkan imbalan dana di waktu yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan nilai waktu dari uang, di mana uang yang kita terima saat ini akan jauh lebih berharga dibandingkan dengan uang akan kita terima tahun depan (Keown : 1999).

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contohnya, membangun rel kereta api, atau suatu pabrik, pembukaan lahan, atau seseorang sekolah di universitas. Untuk lebih jelasnya, investasi juga adalah suatu komponen dari GDP dengan rumus $GDP = C + I + G + (X-M)$. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik, mesin) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya $I = (Y, i)$. Suatu penambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

Investasi selain juga dapat menambah penghasilan seseorang juga membawa risiko keuangan bilamana investasi tersebut gagal. Kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah faktor keamanan (baik dari bencana alam atau diakibatkan faktor manusia), ketertiban hukum, dan lain-lain.

Investasi dibagi menjadi dua sektor, yaitu investasi sektor riil dan investasi sektor finansial. Investasi sektor riil terdiri dari peralatan, pabrik, tanah dan lain-lain. Investasi sektor finansial meliputi pembelian surat-surat berharga. Perekonomian yang sederhana memiliki karakteristik dimana porsi investasi yang terbesar pada sektor riil. Perekonomian modern memiliki karakteristik dimana porsi terbesar pada sektor finansial. Majunya investasi di bidang finansial pada suatu negara akan mendorong kelancaran investasi pada sektor riil. kedua bentuk investasi diatas, memiliki suatu karakteristik yang bersifat komplementer.

Kekayaan materi dari suatu masyarakat atau negara ditentukan oleh kapasitas perekonomian, yaitu produk dan jasa yang bisa diberikan kepada anggota masyarakat. Kapasitas produksi dari suatu perekonomian merupakan fungsi dari aset riil perekonomiannya seperti tanah, bangunan, gedung dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa.

Aset finansial seperti saham dan obligasi tidak mencerminkan kekayaan masyarakat. saham dan obligasi merupakan aset finansial yang memberikan aset tidak langsung terhadap perekonomian suatu negara. Aset finansial merupakan suatu klaim terhadap pendapatan yang diciptakan oleh aset riil (Bodie *et.all* : 2002).

2.2. Foreign Direct Investment (FDI)

Menurut Appleyard (2006) FDI adalah perpindahan modal yang juga mencakup kepemilikan dan kontrol dimana kepemilikan oleh asing atas fasilitas produksi terjadi. FDI meliputi investasi dalam aset-aset riil seperti pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, pembelian perlengkapan inventaris, dan sebagainya. FDI biasanya dilakukan dalam bentuk pembentukan sebuah perusahaan baru atau anak perusahaan yang kemudian yang mengambil alih perusahaan induk jika seseorang atau sekelompok investor dapat membeli sebagian besar saham perusahaan tersebut. Saat ini FDI merupakan saluran utama perpindahan modal swasta internasional. Dalam konteks internasional, FDI biasanya dilakukan oleh perusahaan internasional yang bergerak dalam sektor manufaktur, penggalian sumber daya alam, dan sektor jasa.

Arus perdagangan barang internasional secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan kausalitas dengan arus perdagangan jasa internasional, seperti : teknologi, tenaga kerja, dan khususnya arus modal internasional. Sehubungan dengan arus modal, dapat kiranya dipahami bahwa untuk melakukan transaksi perdagangan internasional disatu pihak tentunya diperlukan modal internasional di satu pihak tentu diperlukan modal internasional, dan di pihak lain transaksi tersebut menghasilkan keuntungan yang kiranya akan diinvestasikan lagi untuk lebih meningkatkan keuntungan.

Hubungan kausalitas antara transaksi perdagangan barang internasional dan modal sebagai salah satu faktor produksi tentu akan menimbulkan arus modal secara internasional karena adanya negara atau wilayah yang memiliki banyak modal (*capital abundant*) dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal (*capital scarce*). Sebagai suatu faktor produksi, modal tentu memiliki *marginal product*, dalam arti semakin banyak modal, maka makin kecil return yang diperoleh. Hal ini menyebabkan timbulnya arus modal internasional yang akan mengalir dari suatu wilayah yang kekurangan modal ke suatu wilayah yang kekurangan modal untuk mencari *return* setinggi mungkin.

Secara umum, arus modal internasional dapat bersifat sebagaimana berikut :

- a. *Portfolio investment*, yaitu arus modal internasional dalam bentuk investasi aset-aset finansial, seperti saham (*stock*), obligasi (*bond*) dan *commercial papers* lainnya. Arus portofolio investment saat ini paling banyak dan cepat mengalir keseluruh penjuru dunia.
- b. *Direct investment*, yaitu investasi riil dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku dan persediaan, dimana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. *Direct investment* ini biasanya dimulai dengan pendirian *subsidiary* atau pembelian saham mayoritas suatu perusahaan. Di dalam konteks internasional, bentuk investasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional atau *Multi National Corporation* (MNC). MNC

melakukan operasi di bidang manufaktur, industri pengolahan, ekstraksi sumber daya alam, industri jasa, dan sebagainya (Hady : 2000).

- c. Dalam hal *Foreign Direct Investment*, Falianty (2006) mendefinisikannya sebagai kepemilikan pihak asing terhadap aset di suatu negara, sehingga mereka dapat melakukan pengawasan langsung terhadap penggunaan aset tersebut. Negara penerima FDI tidak hanya menerima keuntungan berupa modal, tetapi juga akses terhadap teknologi, manajemen, pasar, *international network*, perubahan struktur dan orientasi ekspor.

FDI adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang semakin mengglobal. Ia dimulai pada saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya ke perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (*home country*) dapat mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (*host country*), baik sebagian ataupun seluruhnya. Hal ini dilakukan dengan investor melakukan pembelian perusahaan diluar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana, atau membeli sahamnya sekurangnya 10%.

Umumnya FDI terkait dengan investasi berupa aset-aset produktif, seperti pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan, atau juga konstruksi peralatan atau bangunan yang baru dilakukan oleh perusahaan asing. Penanaman kembali modal (*reinvestment*) dari pendapatan perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka pendek dan panjang antara perusahaan induk dan perusahaan anak atau afiliasinya juga dikategorikan sebagai FDI atau investasi asing langsung.

Sebagian besar FDI ini merupakan kepemilikan penuh atau hampir penuh dari sebuah perusahaan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki bersama (*joint ventures*) dan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal. *Joint ventures* yang melibatkan tiga pihak atau lebih biasanya disebut dengan sindikasi (*sindicates*) dan biasanya dibentuk untuk proyek tertentu seperti konstruksi skala luas atau proyek pekerjaan umum yang melibatkan dan

mempunyai berbagai jenis keahlian dan sumber daya. Istilah FDI biasanya tidak mencakup investasi asing di bursa saham.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 1 ayat 3, yang disebut sebagai Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Adapun yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal.

Bentuk FDI biasanya dapat berupa cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional, lisensi, *joint venture* dan sebagainya adalah merupakan sebuah paket bisnis internasional yang meliputi beberapa komponen modal, pinjaman, ahli material, teknologi, tenaga ahli dan akses pasar internasional. Keberadaan FDI memang tidak dapat dipisahkan dari peranan perusahaan multinasional (*Multi National Cooperation / MNC*). FDI merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis perusahaan MNC selain ekspor dan pemberian lisensi.

2.3. Iklim Investasi

Iklim investasi di Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Indonesia bukan menjadi tujuan utama investasi asing. Para pemodal yang sudah mengenal Indonesia berusaha menghindar untuk melakukan investasi (*Investor Daily* : 2005). Hasil survey Bank Dunia terhadap 155 negara menunjukkan iklim investasi Indonesia tergolong paling buruk di dunia. Iklim yang dimaksudkan mencakup stabilitas ekonomi makro, kepastian hukum, sistem perpajakan, regulasi, korupsi, ketersediaan SDM terampil, dan ketersediaan infrastruktur (listrik, jalan, pelabuhan, telekomunikasi, dll).

Dalam laporan Bank Dunia berjudul "*Doing Business in 2006*" dijelaskan, untuk memulai bisnis di Indonesia para pemodal membutuhkan waktu 151 hari. Hanya sedikit lebih cepat dibandingkan Laos. Waktu yang diperlukan sangat panjang,

karena harus melewati berbagai prosedur. Sedangkan biaya untuk memulai usaha yang harus dikeluarkan investor mencapai 101,7% dari PDB perkapita. Kondisi ini diperparah oleh korupsi yang merebak dimana-mana, diberbagai level. Untuk memperlancar proses perizinan, pemodal terpaksa mengeluarkan sejumlah uang. Regulasi di Indonesia juga dinilai sangat lemah dan hampir mencakup semua aspek. Regulasi yang lemah menyebabkan ketidakpastian hukum dan dalam ketidakpastian hukum pungutan liar dan berbagai tindak korupsi semakin besar.

2.4. Produk Domestik Bruto

Salah satu tujuan *Foreign Direct Investment* (FDI), yaitu mendapatkan sumber-sumber pasar yang baru, artinya para investor akan memilih lokasi *Foreign Direct Investment* (FDI) yang memiliki daya beli yang cukup untuk produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan investor tersebut. Karena tidak mungkin suatu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lambat atau tertinggal mempunyai daya beli yang cukup dan mempunyai market yang menjanjikan. Maka secara umum para investor selalu menghubungkan pemilihan lokasi *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan pertumbuhan ekonomi negara/daerah tujuan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shakirani, Zairy, dan Rizaudin (2002), salah satu faktor yang mempengaruhi masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) ke suatu negara adalah tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dalam penelitiannya pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif dengan *Foreign Direct Investment* (FDI). Artinya semakin baik tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara maka semakin baik/tinggi aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) ke negara tersebut.

Kostlad (2006) dalam jurnalnya menulis hasil dari studi empiris yang dilakukan oleh Root dan Ahmed (1979), Nigh (1985), Healy dan Palepu (1993), serta Singh dan Jun (1995), menemukan bahwa tingkat pertumbuhan GDP dari negara tujuan investasi secara statistik signifikan dan memiliki efek positif terhadap tingkat FDI. Hubbard (1998) menyatakan bahwa dalam sebuah dunia dimana terdapat pasar

tidak sempurna (*imperfect markets*), kesejahteraan (*wealth*) memiliki efek terhadap investasi karena batasan likuiditas.

Oleh karena itu, hubungan antara FDI dan PDRB adalah positif. Hal tersebut didasarkan oleh pertimbangan perekonomian yang bertumbuh diharapkan dapat memberikan pendapatan yang tinggi di masa depan sehingga tingkat pengembalian (*return*) meningkat dengan resiko yang lebih rendah (Arezky et.al : 2005).

2.5. Keterbukaan Perdagangan (*Trade Openness*)

Keterbukaan perdagangan (*trade openness*) berkaitan erat dengan hambatan perdagangan. Menurut Caves dan Dunning (1993) FDI akan cenderung memilih lokasi produksi yang memiliki keunggulan, baik dalam hal biaya produksi yang rendah dan juga biaya transportasi yang rendah. Oleh karena itu semakin terbukanya perdagangan suatu negara maka akan semakin banyak aliran FDI yang masuk ke negara tersebut. Oleh karena itu antara FDI dan keterbukaan (*openness*) memiliki hubungan yang positif.

Semakin tinggi keterbukaan suatu negara menunjukkan semakin besarnya liberalisasi perdagangan negara. Liberalisasi dinilai mampu mendorong peningkatan jumlah perdagangan. Peningkatan inovasi, dikombinasikan dengan pengurangan kendala perdagangan, peningkatan perpindahan modal antar negara semakin mendorong terjadinya peningkatan volume perdagangan (Anna : 2007). Peningkatan perdagangan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan investasi asing (FDI) peningkatan investasi asing

2.6. Inflasi

Williamson (1985), mengatakan bahwa volatilitas inflasi dapat mempengaruhi aliran FDI ke sebuah negara melalui dua cara. Pertama, volatilitas inflasi dapat menyebabkan kerumitan dalam menghitung biaya total. Biaya ini mencakup biaya faktor produksi yang diperoleh secara domestik. baik bahan mentah maupun tenaga kerja. Sehingga menyulitkan dalam penentuan profit dari FDI. Kedua, volatilitas inflasi yang besar menciptakan ketidakpastian yang dalam penentuan internalisasi

yang dapat menggeser kurva TC yang nantinya dapat menggeser profitabilitas FDI. Sehingga parameter inflasi yang diharapkan adalah negatif.

2.7. Kondisi Sosial dan Politik

Menurut hasil penelitian daya saing kemenarikan investasi daerah yang dilakukan oleh Komite pemantau Pelaksanaan Otonomi daerah (KPPOD). Kondisi sosial-politik masih menjadi perhatian utama bagi para pelaku usaha, dan memiliki pengaruh yang besar. Berdasarkan hasil penelitian faktor penentu daya saing investasi daerah yang dilakukan oleh KPPOD memperlihatkan bahwa faktor sosial-politik memiliki bobot yang besar dalam mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya, seperti kondisi perekonomian, infrastruktur, ketenagakerjaan, dan lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan kondisi sosial politik daerah adalah berbagai dampak atau akibat dari hubungan timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi hukum dan segi kehidupan agama, segi kehidupan politik dan keamanan dan sebagainya. Kelompok variabel ini digunakan untuk mengukur seberapa kondusif aspek sosial, politik, keamanan, dan budaya dalam mendukung perekonomian daerah dan daya tarik investasi daerah. Kondisi sosial-politik dibangun dari beberapa indikator, yaitu:

1. Indikator Keamanan

Adalah situasi keamanan di daerah yang mempengaruhi kegiatan usaha/investasi, yang dapat mendukung atau menghambat aktivitas usaha/investasi dan jaminan keselamatan jiwa maupun harta. Kondisi keamanan dapat diukur dari rasa aman dan tingkat gangguan keamanan terhadap dunia usaha maupun terhadap lingkungan masyarakat tempat usaha, serta kecepatan aparat dalam menanggulangi gangguan keamanan.

2. Indikator Sosial Politik

Adalah keadaan di daerah yang merupakan hasil relasi antar pranata-pranata dalam satu sistem sosial di daerah, baik antar pranata politik dan pemerintahan, antar pranata sosial di masyarakat, maupun antar pranata formal dalam pemerintahan

maupun antara elemen-elemen masyarakat. Beberapa aspek yang membentuk kondisi sosial politik daerah diantaranya adalah: keterbukaan birokrasi terhadap partisipasi dunia usaha dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingannya, konflik sosial antar kelompok masyarakat, stabilitas politik, dan kegiatan unjuk rasa.

3. Indikator Budaya Masyarakat

Budaya merupakan seperangkat ide atau gagasan yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang mendasari atau mengilhami perilaku atau tindakan orang, baik secara individu maupun kolektif dari anggota kelompok tersebut. Yang diperlukan oleh investor yang akan masuk ke suatu daerah adalah nilai-nilai budaya masyarakat yang terbuka terhadap masuknya dunia usaha, adanya kondisi dimana masyarakat tidak antipati terhadap suatu investasi usaha. Selain keterbukaan, perilaku nondiskriminatif dari masyarakat setempat dengan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan asal usul, ras, agama, gender dalam kegiatan di setiap sektor. Etos kerja masyarakat, dalam pengertian kemauan kerja keras, persaingan untuk berprestasi, jujur dan mau/mudah untuk dibina; juga menjadi pertimbangan investor untuk membuka usaha di suatu daerah. Bila masyarakat setempat mempunyai etos kerja yang baik maka akan memudahkan investor dalam rekrutmen pekerja tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah tersebut. Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh investor adalah adat istiadat, khususnya adat istiadat masyarakat setempat yang tidak mengganggu produktivitas usaha.

Adapun penghitungan skor dalam indeks sosial-politik ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Bobot Lokal. Dengan pendekatan bobot lokal, akan diperoleh Skor indikator, variabel dan Faktor, masing-masing dengan skala 1 sampai dengan 9. Dengan pendekatan ini, besarnya skor Indikator, variabel dan skor Faktor tidak mencerminkan bobot pengaruhnya terhadap daya saing investasi secara keseluruhan, karena masing-masing mempunyai skala 1 sampai dengan 9. Penghitungan skor dengan pendekatan bobot lokal adalah sebagai berikut:

a. Skor Indikator:

$$I_i = X_i \times B_{li} \dots\dots\dots (2.1)$$

dimana:

I_i : Skor Indikator i ;

X_i : Intensitas Indikator i ; dan

B_{li} : Bobot Lokal Indikator i .

Skor yang diperoleh dengan rumus (2.1) tersebut di atas, merupakan skor lokal indikator dalam suatu variabel.

Contoh:

Skor Indikator Keamanan Usaha Kabupaten Q

- Intensitas Indikator Keamanan Usaha = 4.5

- Bobot Lokal Indikator Keamanan Usaha terhadap Variabel Keamanan = 0.49

Skor Indikator Keamanan Usaha Kabupaten Q

$$= 4.5 \times 0.49$$

$$= 2.21$$

b. Skor Variabel:

Skor Variabel merupakan hasil penjumlahan seluruh skor indikator dalam variabel yang bersangkutan.

Atau:

$$V = \sum_{i=1}^n (X_i \times B_{li}) \dots\dots\dots (2.2)$$

dimana:

V : Skor Variabel;

X_i : Intensitas Indikator i ; dan

B_{li} : Bobot Lokal Indikator i .

Contoh:

Skor Variabel Keamanan Kabupaten Q

Variabel Keamanan terdiri dari 3 Indikator yakni:

(1) Indikator Keamanan Kegiatan Usaha;

(2) Keamanan Lingkungan Masyarakat; dan

(3) Dampak Kegiatan Usaha.

Jika dari hasil perhitungan skor masing-masing indikator telah diketahui, masing-masing besarnya adalah sebagai berikut:

Indikator Keamanan Kegiatan Usaha			Indikator Keamanan Lingkungan Masyarakat		
I₁	BI₁	I₁ = X₁ × BI₁	I₂	BI₂	I₂ = X₂ × BI₂
6,03	0,49	2,94	6,28	0,35	2,22

Indikator Dampak Kegiatan Unjuk Rasa			Variabel Keamanan
I₃	BI₃	I₃ = X₃ × BI₃	V = $\sum_{i=1}^n (X_i \times BI_i)$
5,18	0,16	0,82	
			5,98

Dengan perhitungan berdasarkan rumus (2.2) akan diperoleh skor variabel dengan skala 1 sampai dengan 9. Skor Variabel ini selanjutnya kita sebut dengan skor Lokal. Dengan metode ini skor Variabel mempunyai skala 1 sampai dengan 9.

c. Skor Faktor:

Untuk mendapatkan skor faktor dengan skala 1 sampai dengan 9, terlebih dahulu skor setiap variabel yang ada dalam faktor yang bersangkutan harus dikalikan dengan bobot lokal masing-masing variabel (bobot Variabel terhadap Faktor) dengan rumus sebagai berikut:

$$V = \sum_{i=1}^n (X_i \times BI_i) \times BVi \dots\dots\dots (2.3)$$

Contoh:

Skor Variabel Keamanan untuk Kabupaten Q .

Seperti pada contoh di atas adalah 5.98. Bobot lokal Variabel

Keamanan terhadap Faktor Keamanan adalah 0.61,

Dengan menggunakan rumus (2.3)

$$= 5.98 \times 0.61$$

$$= 3.66$$

Masing-masing skor variabel dikalikan dengan bobotnya masing-masing dengan rumus (2.3). Skor suatu faktor merupakan hasil penjumlahan dari seluruh variabel dengan dalam faktor yang bersangkutan yang terlebih dahulu dihitung ulang dengan rumus (2.3) di atas. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \sum_{i=1}^n V_i \dots\dots\dots (2.4)$$

Contoh:

Skor Faktor Keamanan Politik dan Sosial-Budaya untuk Kabupaten Q Faktor Keamanan Politik dan Sosial-Budaya terdiri dari 3 Variabel, yakni Variabel Keamanan, Variabel Politik, dan Variabel Sosial- Budaya.

- Variabel Keamanan : 5,98

- Variabel Politik : 4,97

- Variabel Sosial-Budaya : 6,00

dengan rumus (2.4) maka diperoleh skor Faktor Keamanan Politik dan Sosial-Budaya untuk Kabupaten Q sebesar :

$$F = (5.98 \times 0.61) + (4.97 \times 0.18) + (6.00 \times 0.21)$$

$$= 3.66 + 0.89 + 1.27$$

$$= 5.82$$

2.8. Sektor Jasa

Sektor jasa, yang juga dikenal sebagai sektor tersier adalah salah satu dari tiga sektor ekonomi, dimana yang lainnya adalah sektor sekunder (sektor manufaktur/pengolahan) dan sektor primer (seperti pertambangan, pertanian dan perikanan). Dalam ekonomi konvensional, sektor jasa didefinisikan sebagai sektor yang terdiri dari barang-barang *intangibile*, yang biasanya output dari sektor ini adalah

konten (informasi), layanan, perhatian, nasihat, pengalaman, dan/atau diskusi (juga dikenal sebagai barang-barang *intangible*). Sektor jasa merupakan sektor ekonomi yang mengusahakan penyediaan jasa kepada konsumen akhir. jasa pelayanan yang diberikan terdiri dari transportasi, distribusi (penjualan barang dari produsen ke konsumen), hiburan dan jenis-jenis jasa lainnya. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah interaksi orang dengan orang atau pelayanan yang dilakukan produsen kepada konsumen, dan bukan kepada pengolahan barang.

Sektor jasa terdiri dari bagian-bagian lunak dari perekonomian seperti jasa konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; real estate dan jasa perusahaan; listrik, gas dan air bersih; dan jenis-jenis pelayanan lainnya. Sehingga tenaga kerja pada sektor ini, menggunakan waktunya untuk menjual pengetahuan, melakukan kerjasama, dan proses loyalitas untuk membuat produktifitas (www.wikipedia.com).

Istilah ekonomi jasa ini , merujuk kepada model dimana banyak aktivitas ekonomi dianggap sebagai layanan. Sebagai contoh, IBM memperlakukan bisnisnya sebagai layanan bisnis. Walaupun IBM memproduksi komputer komputer, namun IBM melihat komputer secara fisik sebagai bagian dari industri "solusi bisnis".

2.9. Penelitian Sebelumnya

Kolstad dan Villanger (2006) dalam jurnalnya yang berjudul *Determinants of Foreign Direct Investment in Services*, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya FDI ke sektor jasa di 57 negara dengan rentang periode dari tahun 1989-2000. Data yang digunakan adalah data panel dengan menggunakan metode *Random Effect Estimation*. Hasil yang didapat adalah political economy indices berpengaruh terhadap arus FDI di sektor jasa. *institutional quality* dan demokrasi, nampaknya lebih penting bagi arus FDI di sektor jasa, dibanding dengan resiko investasi secara umum atau stabilitas politik.

Rana (1988) dalam penelitiannya menulis bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) di Asia dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik. Suatu negara yang politiknya kurang stabil kurang menarik bagi investor. Hasil estimasi model ekonomi

politik ini menunjukkan bahwa GNP riil perkapita dan tingkat pertumbuhan GNP riil perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap FDI, sedangkan tingkat inflasi dan neraca transaksi berjalan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Smarzynska dan Jin Wei (2000) melakukan penelitian mengenai *Corruption And Composition Of Foreign Direct Investment : Firm Level Evidence*. Penelitian tersebut meneliti dampak dari korupsi di suatu negara terhadap preferensi investor untuk membentuk perusahaan cabang (*wholly-owned subsidiary*) atau perusahaan patungan (*joint venture*). Penelitian ini menyatakan bahwa ada *basic trade off* dalam mempergunakan partner lokal. Di satu sisi, korupsi membuat birokrasi lokal tidak transparan dan meningkatkan nilai untuk menggunakan partner lokal untuk memotong jalur birokrasi yang berbelu. Hasil pengujian empirik terhadap hipotesis pada firm-level data menunjukkan bahwa korupsi menurunkan FDI yang masuk ke suatu negara. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan yang sudah mapan tidak memiliki preferensi terhadap bentuk *joint venture*.

Sapriannoor (2006), menganalisis faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi FDI di Indonesia. Data yang digunakan merupakan series tahun 1977-2004 dengan metode OLS. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan hubungan variabel pendapatan nasional dengan FDI positif, hubungan FDI dengan infrastruktur negatif, hubungan FDI dengan jumlah tenaga kerja positif dan signifikan, dan kebijakan deregulasi pemerintah tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap FDI.

Ivan Fithriyanto (2007) meneliti peranan investasi asing langsung terhadap sektor industri manufaktur Indonesia. Menggunakan data *time series*, dengan metode VAR-VECM. Hasil penelitian menunjukkan FDI, ekspor, impor, PDB dalam jangka pendek cenderung saling menyesuaikan untuk mencapai ekuilibrium jangka panjang. Hasil analisis *impuls response function*, adalah positif dalam respon ekspor, dan negative dalam respon impor.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Kolstad dan Villanger (2006). Adapun penelitian Kolstad dan Villanger menggunakan 57 negara sebagai observasi dengan periode penelitian dari tahun 1989 sampai 2000, sedangkan penelitian ini menggunakan 21 propinsi di Indonesia sebagai observasi dengan

periode penelitian dari tahun 2003 sampai 2005. Penelitian ini memotret kondisi FDI di Indonesia dan variabel-variabel yang mempengaruhinya dengan merujuk kepada model dari penelitian Kolstad dan Villanger.



BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Spesifikasi Model

Model yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada model yang digunakan oleh Kolstad dan Villanger (2006), dengan beberapa modifikasi. Adapun model yang digunakan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{LnFDITER}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnPDRB}_{it} + \beta_2 \text{LnOPEN}_{it} + \beta_3 \text{LnINFL}_{it} + \beta_4 \text{LnSOSPOL}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.1)$$

Dimana :

- FDITER = FDI sektor Jasa pada propinsi-propinsi di Indonesia
PDRB = *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) per-kapita pada propinsi-propinsi di Indonesia
OPEN = *share* ekspor-impor (perdagangan) dalam *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB)
INFL = inflasi pada propinsi-propinsi di Indonesia
SOSPOL = indeks tingkat kondisi sosial-politik pada propinsi-propinsi di Indonesia

Penelitian ini menganalisa hubungan antara variabel-variabel independen yang terkait dengan masuknya FDI sektor Jasa ke beberapa propinsi Indonesia pada kurun waktu 2003 - 2005. Dalam penelitian ini dicari hubungan antara masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) di Sektor Jasa terhadap variabel-variabel yang mempengaruhinya (PDRB, OPEN, INFL, SOSPOL). Untuk itu digunakan ekonometri dengan melakukan regresi terhadap variabel dependen (terikat) dan independen (penjelas) yang mempengaruhinya.

3.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan analisa metode data panel dengan menggunakan data *cross section* 21 propinsi yang ada di Indonesia dengan runtun waktu selama 3 tahun.

No	Data	Sumber Data
1	<i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) Sektor Jasa	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Badan Pusat Statistik (BPS)
3	OPEN (<i>share</i> ekspor-impor dalam PDRB)	Badan Pusat Statistik (BPS)
4	Inflasi	Badan Pusat Statistik (BPS)
5	Indeks Sosial-Politik (SOSPOL)	Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

3.3 Metode Ekonometrika Yang Digunakan

3.3.1. Metode Analisis Panel Data

Suatu hal yang menjadi prioritas utama dalam melakukan pengestimasi model adalah masalah karakteristik data yang digunakan. Pada penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data antar waktu dan data antar propinsi sekaligus. Di dalam ekonometri proses penyatuan kedua macam data tersebut yaitu data antar waktu (time

series) dan data antar wilayah/propinsi (cross section) disebut dengan data pooling atau panel data.

Digunakannya panel data dalam penelitian ini, karena menurut Baltagi (2001) panel data memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut adalah :

1. Panel data digunakan untuk mengakomodir heterogenitas dalam unit-unit mikro. Hal ini sangat penting karena pengabaian dari heterogenitas akan berdampak pada hasil estimasi yang bias. (karakteristik utama)
2. Panel data menghasilkan lebih banyak keberagaman melalui kombinasi antar variasi unit mikro (n) dan variasi waktu (t) kondisi ini cukup meningkatkan kemungkinan terjadinya multikolinearitas akan tetapi disisi lain dengan semakin banyaknya data yang lebih informatif akan menghasilkan kemungkinan hasil estimasi yang lebih efisien.
3. Panel data dapat digunakan untuk menyelesaikan topik yang tidak bisa dibahas dalam time-series ataupun cross-section.
4. Panel data dapat menguji dan mengembangkan model perilaku yang lebih kompleks.

Model data panel secara umum adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \dots + \beta_k X_{kit} + \mu_i + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Adapun asumsi-asumsi dalam metode ini adalah

- ε_{it} : *Error term White Noise* dimana $\text{Corr}(\varepsilon_{it}, \mu_{it}) = 0$
- μ_i : *Unobserved / Individual* efek dapat berkorelasi dengan regressor lainnya (X)
- Regressor ($X_{1it} \dots X_{kit}$) adalah *strikly exogenous*

Adapun untuk melakukan estimasinya, terdapat tiga cara, yaitu yang pertama dengan *Ordinary Least Squared*, pendekatan kedua adalah *Fixed Effect Model*, sedangkan pendekatan ketiga adalah *Random Effect Model*.

1. Pendekatan Kuadrat Terkecil (Pooled Least Square/PLS)

Dengan menggabungkan data time series dengan cross section hasil regresi cenderung lebih baik dibandingkan time series atau cross section saja, tetapi dengan menggabungkan data kita tidak dapat melihat perbedaan baik antar individu maupun antar waktu (Nachrowi, 2006). Pada dasarnya model pendekatan *pooled least square* mengasumsikan tidak terdapat masalah *omitted variables*.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \quad (3.3)$$

untuk $i = 1, 2, \dots$, dan $t = 1, 2, \dots$,

dimana i adalah *cross-section identifiers* dan t adalah *time-series identifiers*.

Pendekatan yang paling sederhana untuk mengestimasi persamaan tersebut adalah mengabaikan dimensi *cross-section* dan *time-series* dari data panel dan mengestimasi data dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) yang diterapkan dalam data yang berbentuk *pool*. Pada metode ini, model diasumsikan nilai *intersept* masing – masing variabel adalah sama dan slope koefisien dari dua variabel adalah identik untuk semua unit *cross-section*. Ini merupakan asumsi yang sangat ketat, sehingga walaupun metode PLS menawarkan kemudahan, namun model mungkin mendistorsi gambaran yang sebenarnya dari hubungan antara Y dan X antar unit *cross-section*.

2. Pendekatan Least Square Dummy Variable (LSDV) Model dan Fixed Effect

Kesulitan terbesar dalam pendekatan metode kuadrat terkecil biasa adalah asumsi *intercept* dan *slope* dari persamaan regresi (model) yang dianggap konstan baik antar individu maupun antar waktu (*all coefficients constant across time and individuals*). Asumsi ini sangat ketat dan mungkin tidak beralasan. Satu cara untuk memperhatikan unit *cross-section* atau unit *time-series* adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit *cross-section* maupun antar unit waktu.

Pendekatan yang paling sering dilakukan adalah dengan mengizinkan *intercept* bervariasi antar unit *cross-section* namun tetap mengasumsikan bahwa *slope* koefisien adalah konstan antar unit *cross-section*. Pendekatan ini dalam literatur

dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect model/FEM*). Pendekatan tersebut dapat ditulis dengan persamaan misalnya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Adanya subscript i pada *intercept* yang menandakan bahwa *intercept* dari *unit cross-section* berbeda. Perbedaan ini bisa disebabkan karena fitur khusus setiap unit *cross-section*. Untuk estimasi persamaan tersebut dapat pula dilakukan dengan teknik *dummy variable*. Untuk persamaannya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \dots\dots\dots (3.4)$$

dimana $D_{2i} = 1$ jika observasi adalah unit ke 2 dari *cross-section*, 0 jika lainnya; $D_{3i} = 1$ jika observasi adalah unit ke 3 dari *cross-section*, 0 jika lainnya; $D_{4i} = 1$ jika observasi adalah unit ke 4 dari *cross-section*, 0 jika lainnya. Karena itu α_1 merepresentasikan *intercept* unit ke 1 dari *cross-section* dan α_2 , α_3 , dan α_4 adalah *differential intercept coefficients*; yaitu seberapa besar *intercept* unit ke 2,3 dan 4 dari *cross-section* berbeda dari *intercept* unit ke- 1. Dalam hal ini, unit ke 1 menjadi pembanding. Untuk alasan penggunaan variabel *dummy* inilah maka FEM juga biasa disebut dengan *Least Square Dummy Variable (LSDV) Model*.

Penggunaan LSDV model dapat dilakukan jika persamaan regresi memiliki sedikit unit *cross-section*, namun jika unit *cross-section*nya banyak maka penggunaan LSDV model akan mengurangi derajat kebebasan yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Pada istilah *fixed effect* walaupun *intercept* mungkin berbeda antar individu, namun *intercept* setiap unit *cross-section* tersebut tidak bervariasi sepanjang waktu; dengan kata lain *time invariant*. Jika *intercept* sebagai α_{it} , ini berarti *intercept* setiap unit *cross-section* adalah *time variant*. Selain itu, seperti terlihat pada persamaan FEM mengasumsikan bahwa koefisien dari regresor tidak bervariasi baik antar waktu maupun antar individu. Ide dasar FEM dapat dimulai dari persamaan dibawah ini:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \dots\dots\dots (3.5)$$

Dan nilai *intercept* untuk masing-masing unit *cross-section* dapat dituliskan sebagai:

$$\alpha_i = \alpha + u_i \quad i = 1, 2, \dots, N$$

dimana u_i adalah *unobservable individual effects*. Persamaan regresi dapat juga ditulis sebagai:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_i + e_{it} \dots\dots\dots (3.6)$$

Dalam FEM, u_i diasumsikan berkorelasi dengan *regressor* (X) atau dengan kata lain u_i bersifat *tidak random*.

3. Pendekatan Efek Acak (Random Effect Model/REM)

Dalam pendekatan model REM *unobservable individual effects* (u_i) tidak diasumsikan tidak berkorelasi dengan regressor (X) atau bersifat random, hal tersebut berbeda dengan pendekatan FEM yang mengasumsikan u_i berkorelasi dengan regressor (X) REM dimulai dari persamaan

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_i + e_{it} \dots\dots\dots (3.7)$$

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + E_{it} \dots\dots\dots (3.8)$$

Error term (E_{it}) pada persamaan diatas terdiri dari u_i adalah *cross-section (random) error component*, sedangkan e_{it} adalah *combined error component*. Karena inilah, REM sering juga disebut *Error Components Model (ECM)*. Ada beberapa hal terkait output estimasi REM. Pertama, penjumlahan dari nilai *random effect* adalah nol, karena komponen error (E_{it}) merupakan kombinasi time series error dan cross-section error. Kedua, nilai R^2 diperoleh dari transformasi regresi *Generalized Least-Square (GLS)* maka model *random effect* ini dapat diestimasi dengan metode *Generalized Least-Square (GLS)*.

3. Pendekatan Random Effect Model (REM)

Pendekatan ketiga adalah Random effect model (Estimation of Variance component models). Model ini meningkatkan efisiensi proses pendugaan dan deret waktu. Random effect model dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$\varepsilon_{it} = u_i + v_t + w_{it}$$

Dimana:

$u_i \approx N(0, \sigma_u^2)$ = Komponen galat kerat lintang

$v_t \approx N(0, \sigma_v^2)$ = Komponen galat deret waktu

$w_{it} \approx N(0, \sigma_w^2)$ = Komponen galat kombinasi

Dalam penggunaan random effect model kita juga asumsikan bahwa komponen galat individual tidak berkorelasi satu sama lain (no heteroskedastis) dan komponen galat antar waktu juga tidak berkorelasi (no otokorelasi).

Hubungan antara fixed effect model dan random effect model dapat dilihat dengan memperlakukan intersep dalam fixed effect model sebagai peubah acak, yang satu peubah time series dan yang lain adalah peubah cross section. Jika kedua peubah acak tersebut diasumsikan berdistribusi normal, derajat kebebasan dapat dihemat karena kita hanya perlu memperhatikan rerata dan varians dari masing-masing komoponen galat.

Intersepnya bervariasi terhadap individu dan waktu namun slopenya konstan terhadap individu maupun waktu. Jadi α_i adalah sebuah grup dari gangguan khusus, mirip seperti ε_{it} kecuali untuk setiap grup ada nilai khusus yang masuk dalam regresi secara identik untuk setiap periode. Nilai α_i terdistribusi secara acak pada unit-unit kerat lintang. Modelnya $y_{it} = \alpha_i + \beta x_{it} + u_i + \varepsilon_{it}$ dengan u_i adalah nilai gangguan acak pada observasi i dan konstan sepanjang waktu.

Dengan uraian tersebut, manakah yang lebih disukai apakah random effect model ataukah fixed effect model? Pada random effect model mengurangi sedikit derajat kebebasan dan mempunyai daya tarik konseptual sebagai karakterisasi yang luas terhadap sumber galat dalam data yang besar dengan variasi time series dan cross section yang substansial. Namun demikian, fixed effect model juga memiliki kelebihan dimana pada model ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis sejauh mana dependent variable untuk masing-masing unit cross section berbeda dari rata-

rata keseluruhan cross section. Lebih jauh, ia tidak membutuhkan asumsi bahwa efek-efek individual yang dimasukkan ke dalam galat tidak berkorelasi dengan peubah-peubah penjelas dalam model tersebut, yang mungkin tidak valid sehingga menyebabkan penduga-penduga parameter tidak konsisten.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa jika jumlah individu (N) cukup besar dan jangka waktu penelitian (T) pendek dan asumsi randomitas gangguan dapat dipegang, maka random effect model dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada fixed effect model.

3.3.2. Pemilihan Metode Estimasi Dalam Data Panel

Pemilihan metode estimasi data panel apakah *common effect*, *fixed effect* atau *random effect* dapat dilakukan secara teoritis. Apabila terdapat individual criteria (*unobservable*) maka dapat digunakan OLS (Pooled Least Square) sedangkan jika dampak individual criteria (*unobservable*) berkorelasi dengan regressor lainnya maka dapat digunakan metode *fixed effect* dikarenakan agar effect tersebut akan dimasukkan ke regressor lainnya sehingga menghasilkan hasil estimasi yang lebih baik

Sedangkan jika effect individual criteria tidak berkorelasi dengan regressor lainnya maka dapat dihilangkan dengan memasukan effect tersebut dalam errornya dengan menggunakan metode random effect. Metode ini dapat berfungsi menghilangkan Bias yang disebabkan oleh time varians karena akan dimasukkan kedalam errornya. Sedangkan Bias yang disebabkan oleh individual effect dapat dihilangkan dengan metode *fixed effect* karena effect tersebut dapat dimasukkan kedalam regressor lainnya.

a. Pemilihan model antara common effect dan individual effect

$H_0: \mu_i = 0$ For $i=1 \dots N$ = Pooled OLS (No Unobservable)

$H_1: \mu_i = a$ For $i=1 \dots N$ (Has Unobservable / Individual Criteria)

Dilakukan pengujian melalui cara :

Pengujian F/Chow

$$F_{n-1, nt-n-k} = \frac{(SSE_1 - ESS_2)/(n-1)}{ESS_2/(nt-n-k)}$$

Dimana

SSE =sum square error dari model common effect

ESS = sum square error dari model individual effect

n = jumlah individual (cross section)

t = jumlah series waktu

k = jumlah variabel bebas

Jika F hitung lebih besar dari F-tabel maka model digunakan adalah model individual effect

b. Pemilihan model antara Fixed effect (efek tetap) dan Random effect (efek acak).

H_0 : Unobservable no Corelated with Regressor (random effect)

H_1 : Unobservable Corelatedwith regressor (fixed effect)

Untuk pengujian ini, dapat dilakukan Hausman test. Ide dasarnya dari uji ini adalah adanya hubungan yang berbanding terbalik antara model yang bias dan efisien. Pada metode efek tetap, hasil estimasi tidak bias namun tidak efisien, sebaliknya pada metode efek acak, hasil estimasi adalah bias namun efisien.

Dengan eviws dapat diperoleh hasil uji Hausman beserta *p-valuenya*. Apabila diperoleh *p-value* yang dihasilkan signifikan maka dapat dipilih *fixed effect model*. Sebaliknya apabila *p-value* yang dihasilkan tidak signifikan maka dapat dipilih *random effect model*. Walaupun pada umumnya banyak yang melakukan tahapan uji spesifikasi di atas, menurut Wooldridge (2002), data *pooled cross-section time-series* sebaiknya dilandasi asumsi perbedaan karakteristik setiap individu.

BAB 4

SEKTOR JASA

4.1. Ekonomi Sektor Jasa

Ekonomi sektor jasa adalah salah satu dari tiga sektor ekonomi. Adapun dua sektor yang lain adalah sektor manufaktur dan sektor primer (kegiatan ekstraksi seperti pertambangan, pertanian dan perikanan). Sejak tahun 1960, ekonomi suatu negara cenderung mengikuti perkembangan pembangunan yang bergeser, dari ketergantungan besar pada pertanian dan pertambangan, kemudian beralih kepada pengembangan industri manufaktur (misalnya mobil, tekstil, kapal, baja) dan akhirnya ke arah sektor-sektor yang berbasis kepada jasa. Perekonomian negara yang pertama kali memulainya di dunia modern adalah Inggris. Sektor-sektor yang berbasis kepada jasa inilah yang disebut sebagai Ekonomi sektor jasa.

Sektor jasa terdiri dari kegiatan-kegiatan usaha yang diluar dari sektor primer dan sekunder/manufaktur, yang menghasilkan produk-produk berupa barang-barang *intangible* dan memberikan penyediaan layanan untuk bisnis maupun kepada konsumen akhir.

Sektor jasa terdiri dari jenis-jenis usaha transportasi, distribusi, konstruksi, properti, hiburan, dan bentuk-bentuk usaha jasa lainnya. Pengadaan barang memang dibutuhkan dalam proses pemberian jasa, seperti yang terjadi di jasa restoran, konstruksi, atau peralatan perbaikan. Namun, fokusnya adalah pada interaksi penyedia layanan dengan konsumen, dan tidak pada proses produksi atau mengubah fisik barang.

Sektor ini terdiri dari bagian “lunak” perekonomian seperti telekomunikasi, pariwisata, pengangkutan, perdagangan, properti, dan persewaan. Sektor “lunak” ini bercirikan kepada tenaga kerja yang menggunakan sumber dayanya berupa aset pengetahuan, aset kerjasama, produktivitas, dan potensi- potensi pribadinya. Sehingga dapat dikatakan sektor jasa yang paling umum adalah kerja.

Biasanya output dari sektor ini adalah konten (informasi), layanan, perhatian, nasihat, pengalaman, dan/atau diskusi, yang kesemuanya dikategorikan sebagai barang-

barang *intangible*.

Istilah ekonomi jasa, di sisi lain, merujuk ke sebuah model dimana banyak aktivitas ekonomi mungkin dianggap sebagai sebuah jasa. Misalnya IBM memperlakukan bisnisnya sebagai jasa bisnis. Walaupun masih sebagai produsen komputer, ia melihat fisik barang sebagai bagian dari industri "bisnis solusi". Telah terjadi peralihan untuk model harga berlangganan. Daripada menerima satu pembayaran untuk suatu peralatan yang diproduksi, mereka memilih untuk mencari pendapatan dari kontrak pembelian secara kontinyu.

Sektor jasa, merupakan sektor yang menjadi sektor utama pada sebagian besar perekonomian negara-negara maju, seperti Inggris, Italia, dan Prancis. Dalam beberapa dekade sektor jasa meningkat secara signifikan pada banyak negara-negara maju. Bahkan di Inggris sektor jasa memiliki proporsi terbesar dalam perekonomian.

Hal yang paling utama dari sektor ekonomi jasa adalah kenyataan bahwa sebagian besar jenis usaha dalam sektor jasa berdasarkan kepada pengetahuan, yakni pengetahuan dan informasi yang bernilai uang dan dimana orang-orang yang memilikinya akan sukses dalam bekerja di jenis usaha tersebut. Semakin pelaku usaha sektor jasa berfokus pada kenyataan ini, maka mereka akan bersaing dengan para pesaingnya dengan melalui usaha memahami apa yang diinginkan konsumen mereka, dan memberikan pelayanan dengan cepat dan efisien (www.wikipedia.com).

4.2. Ruang Lingkup Sektor Jasa

Sektor jasa terdiri dari sektor-sektor usaha jasa, yang produknya merupakan kegiatan penyediaan layanan atau lazim disebut sebagai barang-barang *intangible*. Adapun definisi dari layanan atau jasa itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Dorojatun Kuntjoro Djakti, Jasa adalah unsur yang dijumpai dalam setiap kegiatan ekonomi ataupun yang ditawarkan secara tersendiri, secara real time, memiliki nilai ekonomi, bersifat *intangible* atau *invisible* dan dijumpai terlepas dari keberadaan sumberdaya alam serta sering tidak dapat disimpan.
2. Philip Kotler, Jasa adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya bersifat *intangible* tidak menghasilkan kepemilikan

sesuatu. Proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik tertentu.

3. Philip R. Catcore and John M. Hess, Jasa adalah aktifitas, manfaat atau keputusan yang ditawarkan strategi pemasaran.

Merujuk pada beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa layanan atau jasa yang merupakan produk dari sektor jasa, paling tidak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. *intangibile*;
2. tidak dapat disimpan;
3. dapat berbentuk suatu prestasi;
4. proses produksi dapat terkait dengan produk fisik tertentu ataupun mandiri;
5. berupa elemen yang dijumpai dalam setiap kegiatan ekonomi dan dapat diperjual belikan, oleh karena itu memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat dikatakan bahwa layanan atau jasa bersifat ekperimental, dengan kata lain pengguna jasa atau barang yang memiliki unsur jasa baru menyadari keberadaan jasa setelah waktu pemanfaatannya lewat. Manfaat yang dirasakan akan menimbulkan reaksi positif/puas atau negatif/kecewa (Dit. Binus & PP : 2006).

Sektor jasa, seperti telah dijelaskan diatas terdiri dari sektor-sektor usaha jasa yang menyediakan produk berupa layanan atau jasa. Adapun sektor-sektor usaha jasa tersebut terdiri dari, jasa konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estate dan jasa perusahaan; listrik, gas dan air bersih; serta jasa lainnya. Berikut ini akan dijelaskan ruang lingkup dari masing-masing sektor tersebut:

1. Perdagangan, Hotel dan Restoran

a) Perdagangan

Kegiatan yang dicakup sub sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, dengan tujuan untuk disalurkan tanpa mengubah sifat barang tersebut.

Sub sektor perdagangan dikelompokkan dalam dua jenis kegiatan yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar meliputi kegiatan

pengumpulan dan penjualan kembali barang baru dan bekas oleh pedagang dari produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru maupun bekas.

b) Hotel

Sub sektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi di sini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap dimana kegiatan tersebut menjadi satu kesatuan manajemen dengan penginapan.

c) Restoran

Kegiatan sub sektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya di tempat penjualan, seperti: rumah makan semua tipe, warung nasi, warung kopi, tempat minum, katering dan kantin, termasuk pedagang makanan/minuman keliling.

2. Konstruksi

Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan pemasangan/instalasi, pembongkaran dan perbaikan bangunan. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi yang dipakai untuk sendiri.

3. Pengangkutan dan Komunikasi

a) Pengangkutan

Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor ini terdiri atas jasa angkutan jalan raya; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; dan jasa penunjang angkutan. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang

dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

b) Komunikasi

Sub sektor ini terdiri dari kegiatan pos dan giro, telekomunikasi dan jasa penunjang komunikasi. Kegiatan pos dan giro mencakup pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan paket pos. Kegiatan telekomunikasi meliputi pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon dan telex. Jasa penunjang komunikasi meliputi kegiatan lainnya yang menunjang komunikasi, seperti: warung telepon (wartel), warung internet (warnet), dan telepon seluler (ponsel), dan lain-lain.

4. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan

a) Keuangan, terdiri dari:

- Bank

Kegiatan yang dicakup adalah kegiatan yang memberikan jasa keuangan pada pihak lain, seperti: menerima simpanan, terutama dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka panjang, pendek dan menengah, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya.

- Lembaga Keuangan Bukan Bank

Terdiri dari jasa asuransi, dana pensiun, pegadaian, lembaga pembiayaan.

- Jasa Penunjang Keuangan

Mencakup kegiatan pedagang valuta asing, pasar modal dan jasa penunjangnya, manajer investasi, penasehat investasi, reksa dana, biro administrasi efek, tempat penitipan harta, dan sejenisnya.

b) Real Estate

Sub sektor ini meliputi usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti perkantoran, pertokoan serta usaha persewaan tanah persil.

c) Jasa Perusahaan

Sub sektor ini mencakup kegiatan pemberian jasa hukum, jasa akuntansi, dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan/arsitek, jasa periklanan dan riset pemasaran, jasa persewaan mesin dan peralatan, jasa penyelenggaraan pameran, dan jasa lainnya.

5. Listrik, Gas dan Air Bersih

a) Listrik

Kegiatan ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

b) Gas

Kegiatan ini meliputi penyediaan, transmisi dan penyaluran gas kepada konsumen dengan menggunakan pipa. Untuk Indonesia sub sektor ini hanya dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero).

c) Air Bersih

Kegiatan sub sektor air bersih mencakup proses pengadaan, pembersihan, penyulingan/pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum, serta penyalurannya secara langsung melalui pipa dan alat lain untuk dijual ke rumah tangga, instansi pemerintah maupun swasta.

6. Jasa Lainnya

a) Pemerintah Umum

Jasa pemerintah umum pada prinsipnya terbagi kepada dua kegiatan. Pertama, jasa administrasi pemerintahan dan pertahanan merupakan hasil aktivitas pemerintah sehari-hari dalam melayani masyarakat umum/publik dalam bidang administrasi pemerintahan dan keamanan. Kedua, jasa pemerintahan lainnya merupakan kekuatan pemerintah dalam melayani masyarakat di bidang jasa sosial dan kemasyarakatan (jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa sosial dan kemasyarakatan lainnya), serta hiburan dan rekreasi seperti yang dilakukan oleh pihak swasta.

b) Jasa Swasta

Terdiri dari jasa sosial dan kemasyarakatan dan jasa hiburan dan rekreasi. Jasa sosial dan kemasyarakatan meliputi jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa kebersihan,

panti asuhan, panti wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat, palang merah, rumah ibadat dan sejenisnya yang dikelola oleh swasta. Sedangkan jasa hiburan dan rekreasi meliputi kegiatan produksi dan distribusi film komersial dan film dokumenter untuk kepentingan pemerintah serta reproduksi film video, jasa bioskop, dan panggung hiburan, studio radio, perpustakaan, museum, kebun binatang, gedung olah raga, kolam renang, klab malam, taman hiburan, lapangan golf, lapangan tenis, bilyar, klub galatama, artis film, artis panggung, karaoke, video klip, studio televisi, dan stasiun pemancar radio yang dikelola oleh swasta.

4.3. Proses Penyampaian (*mode of supply*) Jasa

1. *Cross Border Supply* (mode 1), merupakan pelayanan jasa oleh penyedia jasa pada suatu negara kepada pengguna jasa di wilayah negara lain; contoh mode 1 adalah manakala seorang konsultan management di negara A memberikan layanan konsultasi bisnis pada seseorang atau badan usaha di negara B, atau kontraktor jalan raya Indonesia membangun infrastruktur jalan tol di Malaysia (jasa konstruksi).
2. *Consumption Abroad* (mode 2), mengacu pada kondisi dimana pengguna jasa pada negara A mengkonsumsi jasa di negara B; contoh mode 2 ini adalah manakala penduduk Indonesia pergi berobat ke Australia atau Singapura (jasa kesehatan), atau turis Australia mendatangi Bali untuk berlibur (jasa pariwisata).
3. *Commercial Presence* (mode 3), mengacu pada kondisi dimana penyedia jasa pada negara A menyediakan/menawarkan jasanya di negara B melalui kehadiran secara fisik dengan mendirikan kantor perwakilan atau kantor cabang di negara B; sebagai contoh Citi Bank memberikan jasa perbankan untuk konsumen Indonesia melalui pembukaan kantor cabangnya di Indonesia.
4. *Movement of Natural Person* (mode 4), dimana pemasok jasa yang berasal dari negara A memberikan layanan jasa di negara B dengan mengirimkan tenaga profesional atau tenaga ahli tanpa mendirikan kantor perwakilan atau kantor cabang di negara B.

(Dit. Binus & PP : 2006)

4.4. Sektor Jasa Dalam Perekonomian Indonesia

1. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor ini berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Secara keseluruhan pertumbuhan sektor ini sekitar 6,4 persen pada tahun 2006, dan mengalami kenaikan menjadi 8,5 persen pada tahun 2007. Kenaikan pertumbuhan pada tahun 2007 terjadi pada seluruh sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, hotel serta restoran.

Pada tahun 2007 sub sektor perdagangan besar maupun eceran tumbuh sekitar 8,9 persen lebih tinggi bila dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,6 persen. Kenaikan pertumbuhan ini menunjukkan mulai bergairahnya perekonomian dalam dan luar negeri sejak tiga tahun terakhir ini. Pertumbuhan sub sektor ini seiring dengan permintaan dan penyediaan beberapa produk barang yang dihasilkan sektor pertanian dan sektor industri. Sub sektor hotel tumbuh sekitar 5,3 persen pada tahun 2007 atau mengalami kenaikan dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang tumbuh sekitar 5,2 persen. Wisatawan mancanegara yang diperkirakan bertambah akibat keadaan politik dan keamanan yang cukup kondusif nampak berpengaruh terhadap industri perhotelan. Berbagai upaya tetap dilakukan untuk dapat menarik wisatawan berkunjung ke Indonesia melalui peningkatan keamanan serta peningkatan akomodasi secara terus menerus baik secara kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan promosi kepariwisataan yang terus digalakan dalam rangka meningkatkan perolehan devisa negara.

Demikian halnya yang terjadi pada sub sektor restoran, yang pertumbuhannya mengalami kenaikan dari 5,8 persen pada tahun 2006 menjadi sebesar 6,8 persen pada tahun 2007. Pendapatan masyarakat juga berpengaruh pada konsumsi makanan jadi di luar rumah, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kegiatan restoran.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran menduduki urutan kedua dalam pembentukan GDP setelah sektor industri pengolahan dengan andil sekitar 15,0 persen pada tahun 2006 dan sekitar 14,9 persen pada tahun 2007. Sumbangan terbesar pada sektor ini diberikan oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran, yaitu sekitar 11,7 persen pada tahun 2006 dan 11,8 persen pada tahun 2007. Kemudian sub sektor restoran menyumbang 2,3 persen pada tahun 2006 dan 2,7 persen pada tahun 2007, dan sub sektor hotel memberikan andil 0,5 persen pada tahun 2006 dan 0,4 persen pada tahun 2007.

2. Konstruksi

Sektor ini merupakan sektor dengan pertumbuhan yang cukup mengesankan. Pada tahun 2007 tercatat pertumbuhan pada sektor ini mencapai 8,6 %. Prospek sektor ini diharapkan akan tetap cerah terutama dengan proyek baru dalam pembangunan infrastruktur diberbagai sektor. Besarnya sumbangan sektor ini terhadap GDP pada tahun 2006 sebesar 7,5 persen dan pada tahun 2007 naik menjadi sebesar 7,7 persen.

3. Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki peranan sebagai pendorong aktivitas pada setiap sektor ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan sektor ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi menjadikan dunia tanpa batas. Sub sektor transportasi memiliki peran sebagai jasa pelayanan bagi mobilitas perekonomian.

Sektor ini pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan sub sektor komunikasi naik sebesar 29,5 persen pada tahun 2007 dari 26,4 persen pada tahun 2006. Sebagai sektor yang mendukung aktivitas sektor riil, sektor pengangkutan dan komunikasi berkaitan erat dengan sektor-sektor lain. Pertumbuhan sektor ini sangat dipengaruhi oleh dinamisnya mobilisasi masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Sementara pertumbuhan yang terjadi di sub sektor pengangkutan pada tahun 2007 secara keseluruhannya tumbuh positif. Angkutan jalan raya sekitar 1,2 persen pada tahun 2007 dari 6,4 persen pada tahun 2006, angkutan laut menurun menjadi minus 2,7 persen pada tahun 2007 dari 7,2 persen pada tahun 2006, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sekitar 3,3 persen pada tahun 2007 dari 3,8 persen pada tahun 2006. Sedangkan sub sektor angkutan udara tumbuh sekitar 0,6 persen pada tahun 2007 dari sekitar 0,6 persen pada tahun 2007 dari sekitar 7,1 persen pada tahun 2006.

Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dalam pembentukan GDP pada tahun 2007 tidak mengalami peningkatan, begitu juga untuk sub sektornya hampir semua mengalami penurunan. Peranan sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2006 sekitar 6,9 persen, kemudian menurun menjadi 6,7 persen pada tahun 2007. Kontribusi terbesar dipegang oleh sub sektor pengangkutan sekitar 4,3 persen pada tahun 2006 dan sekitar 3,8 persen pada tahun 2007, sedangkan sub sektor komunikasi mengalami

peningkatan dari sekitar 2,7 persen pada tahun 2006 menjadi 2,9 persen pada tahun 2007. Untuk sub sektor pengangkutan, andil terbesar diberikan oleh kegiatan jasa angkutan jalan raya yaitu sekitar 2,4 persen pada tahun 2007. Untuk sub sektor pengangkutan, andil terbesar diberikan oleh kegiatan jasa angkutan jalan raya yaitu sekitar 2,4 persen pada tahun 2006 dan 2,2 persen pada tahun 2007. Adapun kegiatan jasa pengangkutan lainnya baik pada tahun 2006 maupun 2007 masing-masing hanya memberi kontribusi kurang dari satu persen terhadap GDP.

4. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan

Pada sektor ini semua sub sektor mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2007 dan tertinggi dialami oleh sub sektor jasa penunjang keuangan sekitar 9,7 persen, diikuti oleh jasa perusahaan sekitar 8,2 persen. Sub sektor lembaga keuangan bukan bank sekitar 8,1 persen, bank dan real estate masing-masing sekitar 8,0 persen dan 7,9 persen. Beberapa kebijakan di bidang moneter dan fiskal oleh pemerintah pada saat krisis yang lalu telah membuat sektor ini terpuruk cukup drastis, namun pada beberapa tahun terakhir sektor ini mampu bangkit dan mengalami pertumbuhan yang positif.

5. Listrik, Gas dan Air Bersih

Sektor ini merupakan sektor penunjang kegiatan ekonomi, dan sebagai infrastruktur yang mendorong aktifitas proses produksi sektoral maupun untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan sektor ini pada tahun 2006 sekitar 5,8 persen dan mengalami kenaikan pertumbuhan menjadi 10,4 persen pada tahun 2007. Pertumbuhan sektor ini merupakan yang paling stabil dibanding sektor lain, baik selama dan pasca krisis ekonomi.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 dihasilkan oleh sub sektor gas kota yaitu sekitar 30,2 persen, dan diikuti oleh sub sektor listrik sekitar 7,8 persen. Sub sektor air bersih mempunyai pertumbuhan yang terendah dibanding kedua sub sektor lainnya yaitu hanya sekitar 3,3 persen.

Diantara sektor-sektor ekonomi lainnya, sektor listrik, gas dan air bersih memiliki porsi paling kecil terhadap GDP. Tahun 2006 dan 2007 kontribusi sektor ini terhadap GDP masing-masing sekitar 1,0 persen dan 0,9 persen.

6. Jasa lainnya

Sektor ini terdiri dari jasa pemerintahan umum dan jasa swasta. Jasa pemerintahan

umum mencakup kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan, dan jasa pemerintahan lainnya, seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa kemasyarakatan lain. Sedangkan sub sektor jasa swasta meliputi kegiatan jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, dan jasa perorangan dan rumah tangga.

Agak berbeda dengan perkembangan sektor lain, sektor ini pertumbuhannya tidak terlalu berfluktuasi dan nampak lamban, namun demikian sektor ini diharapkan memiliki prospek yang baik terutama sub sektor swasta.

Pertumbuhan sektor jasa-jasa secara total adalah 6,2 persen di tahun 2006 dan meningkat menjadi 6,6 persen pada tahun 2007. Sub sektor jasa pemerintahan umum menunjukkan pertumbuhan yang lambat dari tahun ke tahun, yaitu sekitar 4,0 persen pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 5,4 persen pada tahun 2007.

Pertumbuhan sub sektor jasa swasta sekitar 8,0 persen pada tahun 2006, kemudian menurun pada tahun 2007 menjadi 7,6 persen. Kenaikan tertinggi dialami oleh sosial kemasyarakatan yaitu sekitar 7,6 persen pada tahun 2007. Selanjutnya, jasa perorangan dan rumah tangga serta jasa hiburan dan rekreasi masing-masing tumbuh sekitar 7,6 persen dan 7,3 persen pada tahun 2007.

Sejalan dengan pertumbuhannya, kontribusi yang diberikan sektor ini terhadap GDP sebesar 10,1 persen pada tahun 2006 dan tahun 2007. Kontribusi terbesar diberikan oleh sub sektor jasa pemerintahan umum, yaitu sekitar 5,0 persen pada tahun 2006 dan 5,2 persen pada tahun 2007. Sub sektor jasa swasta mempunyai kontribusi sekitar 5,0 persen pada tahun 2006 dan 4,9 persen pada tahun 2007. Meskipun peranannya masih kecil, namun sub sektor jasa swasta dalam perkembangannya di masa mendatang akan menjadi penting, terutama peranannya sebagai pendukung aktifitas perekonomian dan adanya permintaan domestik yang terus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat (BPS : 2007).

BAB 5

PEMBAHASAN DAN ANALISA

5.1. Uji Spesifikasi Model

Hasil estimasi koefisien parameter variabel persamaan regresi akan ditampilkan berdasarkan estimasi secara keseluruhan meliputi 21 propinsi. Estimasi ini dilakukan dengan program software Eviews 5.1. Seperti telah dijelaskan dalam Bab III, setiap model data panel dapat diestimasi dengan menggunakan *pool (common) regression, fixed effect model, maupun random effect model*. Dalam penelitian ini, untuk memastikan model mana yang terbaik maka dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Penentuan model estimasi yang terbaik antara *common effect* dengan *individual effect*. Untuk memastikan hal tersebut maka dilakukan uji F. Dari uji F didapat hasil bahwa F hitung adalah 129,099 yang berarti lebih besar dari nilai F tabel dengan nilai α 1% yang sebesar 3,65. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 yang menyatakan bahwa intersep untuk semua individu sama (*common effect*) ditolak. Setelah itu dilakukan uji dengan menggunakan uji *likelihood rasio*. Dari uji *likelihood rasio* didapat hasil bahwa Chi-square hitung adalah 278,010 yang berarti lebih besar dari nilai Chi-square tabel dengan nilai α 1% yang sebesar 13,276. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah yang menunjukkan adanya efek individu atau *individual effect model* (intersep untuk semua kabupaten/kota berbeda).
- b. Setelah diperoleh kesimpulan bahwa efek individu adalah model yang sesuai, maka dilakukan uji hausman untuk memperoleh kesimpulan apakah akan digunakan *fixed effect model* atukah *random effect model*. Dari hasil pengujian dengan menggunakan uji hausman, diperoleh nilai Chi-square hitung sebesar 1,933 yang berarti lebih kecil dari nilai Chi-square tabel yang sebesar 13,27. Sehingga dengan H_0 yang menyatakan bahwa model adalah *random effect model*,

maka secara statistik H_0 dapat diterima. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa model estimasi yang paling baik adalah *random effect model*.

Dari hasil pengujian pemilihan model estimasi yang paling baik tersebut, yaitu *random effect model* diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-15.39167	12.24442	-1.257036	0.2138
LOG(PDRB?)	2.091576	0.455789	4.588917	0.0000
LOG(OPEN?)	1.573689	0.745399	2.111203	0.0391
LOG(INFL?)	-2.596053	1.383976	-1.875793	0.0657
LOG(SOSPOL?)	0.626399	0.233290	2.685065	0.0094
Random Effects				
(Cross)				
_SUMUT-C	0.923420			
_SUMBAR-C	1.737187			
_RIAU-C	3.497977			
_SUMSEL-C	-3.143918			
_LAMPUNG-C	-1.430506			
_DKIJAKARTA-C	1.417887			
_JABAR-C	0.549600			
_BANTEN-C	1.341798			
_JATENG-C	-1.328453			
_DIY-C	3.528545			
_JATIM-C	-1.827807			
_BALI-C	-0.746417			
_KALBAR-C	-0.605436			
_KALTIM-C	-0.296522			
_SULUT-C	4.345457			
_SULSEL-C	-2.134060			
_NTB-C	0.880067			
_SULTRA-C	-0.730746			
_NTT-C	-2.490153			
_KALSEL-C	-2.735662			
_JAMBI-C	-0.752257			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.276543	0.9840
Idiosyncratic random			0.290016	0.0160

Weighted Statistics

R-squared	0.553743	Mean dependent var	1.139979
Adjusted R-squared	0.522966	S.D. dependent var	0.412353
S.E. of regression	0.284803	Sum squared resid	4.704529
F-statistic	17.99245	Durbin-Watson stat	1.230211
Prob(F-statistic)	0.000000		

5.2. Uji Signifikansi dan Arah Pengaruh Variabel-variabel Bebas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil uji signifikansi yang telah dilakukan untuk melihat kesesuaian model dan signifikansi dari variabel bebas secara individu maupun bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dilihat dari Prob(F-statistic) yang diperoleh dari hasil pengolahan data sebesar 0, yang lebih kecil dari α (0,01) berarti menunjukkan bahwa variabel total PDRB propinsi, keterbukaan propinsi, Inflasi propinsi, sosial politik propinsi secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan pada nilai $\alpha = 1\%$.
2. Untuk melihat apakah secara individu variabel-variabel independen (PDRB, keterbukaan, inflasi, indeks sosial-politik) mempengaruhi arus masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa dapat dilihat dari nilai prob (t) seperti pada tabel 5.1. diatas. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen pada nilai α yang berbeda-beda. Variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) propinsi dan sosial-politik propinsi signifikan mempengaruhi arus masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa pada nilai $\alpha = 0,01$ sedangkan variabel independen keterbukaan propinsi signifikan mempengaruhi arus masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa pada nilai $\alpha = 0,05$ sedangkan variabel independen inflasi propinsi signifikan mempengaruhi arus masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa pada nilai $\alpha = 0,10$ sedangkan variabel independen indeks sosial-politik propinsi signifikan

mempengaruhi arus masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa pada nilai $\alpha = 0,01$.

Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) propinsi adalah positif dan signifikan, dimana setiap kenaikan 1 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menaikkan arus masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa sebesar 2,091 persen, ceteris paribus. Kemudian hubungan antara keterbukaan propinsi adalah positif dan signifikan, dimana setiap kenaikan 1 persen keterbukaan akan menaikkan arus masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa sebesar 1,573 persen, ceteris paribus. Lalu hubungan antara inflasi propinsi adalah negatif dan signifikan, dimana setiap kenaikan 1 persen inflasi akan menaikkan arus masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa sebesar 2,596 persen, ceteris paribus. Demikian pula hubungan antara indeks sosial-politik propinsi adalah positif dan signifikan, dimana setiap kenaikan 1 persen indeks sosial-politik akan menaikkan arus masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa sebesar 0,626 persen, ceteris paribus.

5.3. Pembahasan Hasil Estimasi

5.3.1. Analisis Koefisien Variabel-variabel Bebas Hasil Estimasi

Dari hasil estimasi menggunakan *random effect model*, dapat dijelaskan besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas (terhadap variabel terikat (*Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa). Seperti terlihat pada tabel 5.1. diatas, hasil estimasi dari model penelitian ini adalah:

$$\text{Ln}(\text{FDITER})_{it} = -13,591 + 2,091 \text{Ln}(\text{PDRB})_{it} + 1,573 \text{Ln}(\text{OPEN})_{it} - 2,596 \text{Ln}(\text{INFL})_{it} + 0,626 \text{Ln}(\text{SOSPOL})_{it}$$

5.3.1. Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa

Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa bernilai positif yaitu

sebesar 2,091. Karena model yang digunakan adalah *double log*, sehingga koefisien parameter yang dihasilkan adalah merupakan nilai elastisitas. Dari koefisien regresi tersebut menunjukkan hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa berpengaruh signifikan secara statistik, yaitu pada $\alpha = 1$ persen. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah positif dan signifikan, yaitu setiap kenaikan 1 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menaikkan arus masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa sebesar 2,091 persen, ceteris paribus.

Hubungan yang searah tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat pertumbuhan PDRB di suatu propinsi, maka akan sangat berpengaruh kepada tinggi atau rendahnya pertumbuhan arus masuk FDI sektor Jasa di propinsi tersebut. Hal tersebut dikarenakan PDRB merupakan sebuah indikator untuk melihat daya beli dari wilayah tersebut, dan FDI akan masuk ke suatu wilayah yang memiliki daya beli yang tinggi. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shakirani, Zairy, dan Rizaudin (2002), yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) ke suatu negara adalah tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dalam penelitiannya pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif dengan *Foreign Direct Investment* (FDI). Artinya semakin baik tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara maka semakin baik (tinggi) pada aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) ke negara tersebut.

Bagi FDI sektor Jasa daya beli yang dimiliki oleh suatu daerah sangat penting, karena FDI sektor Jasa lebih menjadikan konsumen domestik sebagai sasarannya. Sehingga daya beli yang dimiliki oleh konsumen domestik di daerah tersebut menjadi sangat penting. Semakin tinggi daya beli konsumen domestik di daerah tersebut, maka akan semakin banyak Fdi sektor Jasa yang masuk ke daerah tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah daya beli konsumen domestik di daerah tersebut, maka akan semakin sedikit Fdi sektor Jasa yang masuk ke daerah tersebut

5.3.2. Hubungan antara keterbukaan dengan *Foreign Direct Investment (FDI)* sektor Jasa

Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien keterbukaan terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)* sektor Jasa bernilai positif yaitu sebesar 1,573. Dari koefisien regresi tersebut menunjukkan hubungan antara keterbukaan dengan *Foreign Direct Investment (FDI)* sektor Jasa berpengaruh signifikan secara statistik, yaitu pada $\alpha = 5$ persen. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keterbukaan adalah positif dan signifikan, yaitu setiap kenaikan 1 persen keterbukaan akan menaikkan arus masuknya *Foreign Direct Investment (FDI)* sektor Jasa sebesar 1,573 persen, ceteris paribus.

Hubungan yang searah tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan propinsi akan mempengaruhi pertumbuhan arus masuknya FDI sektor Jasa ke propinsi tersebut. Karena semakin tinggi atau rendahnya ekspor-impor dari suatu daerah, maka akan semakin tinggi atau rendah pula arus masuk FDI sektor Jasa ke daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh, FDI sektor Jasa membutuhkan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka penyediaan suatu Jasa, yang seringkali peralatan dan bahan-bahan tersebut harus diimpor dari luar negeri. Sehingga dalam hal ini kemudahan akses keluar-masuk barang ke suatu negara menjadi sangat penting. Semakin besar tingkat liberalisasi perdagangan diterapkan di suatu negara, maka akan semakin mudah akses keluar-masuk barang ke negara tersebut, dan hal ini sangat menguntungkan bagi FDI sektor Jasa karena mempermudah dalam memenuhi kebutuhan akan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka penyediaan Jasa.

5.3.3. Hubungan antara inflasi dengan *Foreign Direct Investment (FDI)* sektor Jasa

Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien inflasi terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)* sektor Jasa bernilai negatif yaitu sebesar 2,596. Dari koefisien regresi tersebut menunjukkan hubungan antara inflasi dengan *Foreign Direct Investment (FDI)* sektor Jasa berpengaruh signifikan secara statistik, yaitu pada $\alpha =$

10 persen. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara inflasi adalah negatif dan signifikan, yaitu setiap kenaikan 1 persen inflasi akan menurunkan arus masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa sebesar 2,596 persen, *ceteris paribus*.

Hubungan terbalik tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap arus masuknya FDI sektor Jasa ke suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan inflasi akan mempengaruhi daya beli pada pasar domestik di daerah tersebut. Apabila inflasi semakin meningkat, maka daya beli pada pasar domestik akan semakin menurun. Selain itu besarnya tingkat inflasi di suatu daerah juga akan menyebabkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan investor dalam menjalankan usahanya di daerah tersebut.

Menurut Wiliamson (1985), mengatakan bahwa volatilitas inflasi dapat menyebabkan kerumitan dalam menghitung biaya total. Biaya ini mencakup biaya faktor produksi yang diperoleh secara domestik, baik bahan mentah maupun tenaga kerja. Sehingga menyulitkan dalam penentuan profit dari FDI. Kemudian, volatilitas inflasi yang besar juga dapat menciptakan ketidakpastian yang dalam penentuan internalisasi yang dapat menggeser kurva TC yang nantinya dapat menggeser profitabilitas FDI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi dapat menyebabkan biaya yang tinggi bagi perusahaan FDI Jasa, berarti semakin tinggi inflasi maka akan semakin tinggi pula biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan FDI Jasa.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan FDI Jasa. Sehingga hubungan antara inflasi dan masuknya FDI sektor Jasa adalah terbalik atau negatif.

5.3.4. Hubungan antara indeks sosial-politik dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa

Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien indeks sosial-politik terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa bernilai positif yaitu sebesar 0,626. Dari koefisien regresi tersebut menunjukkan hubungan antara indeks sosial-politik dengan

Foreign Direct Investment (FDI) sektor Jasa berpengaruh signifikan secara statistik, yaitu pada $\alpha = 1$ persen. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara indeks sosial-politik adalah positif dan signifikan, yaitu setiap kenaikan 1 persen indeks sosial-politik akan menaikkan arus masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor Jasa sebesar 0,626 persen, ceteris paribus.

Hubungan yang searah tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial-politik di suatu daerah berpengaruh terhadap arus masuknya FDI sektor Jasa ke daerah tersebut. Semakin baik kondisi sosial-politik di suatu daerah, maka akan semakin banyak arus masuk FDI sektor Jasa ke daerah tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk kondisi sosial-politik di suatu daerah, maka akan semakin sedikit arus masuk FDI sektor Jasa ke daerah tersebut. Oleh karena itu kondisi sosial-politik yang baik, sangat penting dalam rangka menarik arus FDI sektor Jasa ke suatu daerah daerah.

Berdasarkan pembahasan dari hasil estimasi terhadap hubungan kondisi sosial-politik dengan arus masuknya FDI sektor Jasa diatas dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial-politik yang buruk berpengaruh terhadap arus masuk FDI sektor Jasa ke setiap propinsi. Dengan demikian, berarti semakin buruk kondisi sosial-politik suatu daerah, maka akan semakin menurunkan arus masuk FDI sektor Jasa ke propinsi tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin baik kondisi sosial-politik suatu daerah, maka akan semakin meningkatkan arus masuk FDI sektor Jasa ke propinsi tersebut.

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan pada Bab I, bertujuan untuk mengetahui tentang hubungan antara PDRB, keterbukaan, inflasi, kondisi sosial-politik dengan masuknya FDI sektor Jasa di Indonesia. dan bagaimana pengaruh dari variabel-variabel independen tersebut (PDRB, keterbukaan, inflasi, indeks sosial-politik) terhadap variabel dependennya (FDI sektor Jasa). Untuk alat bantu analisis digunakan panel data dengan observasi dilakukan pada 21 propinsi di Indonesia, yaitu propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istema Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Adapun periode penelitian adalah dari tahun 2003 sampai 2005.

Berdasarkan estimasi dengan menggunakan *random effect model* didapat hasil sebagai berikut:

1. Hubungan antara pertumbuhan PDRB propinsi dengan pertumbuhan FDI sektor Jasa propinsi adalah positif dan signifikan. Setiap kenaikan 1 persen PDRB pada 21 propinsi akan meningkatkan pertumbuhan FDI sektor Jasa ke 21 propinsi tersebut rata-rata sebesar 2,091 persen (*ceteris paribus*).
2. Hubungan antara pertumbuhan keterbukaan propinsi dengan pertumbuhan FDI sektor Jasa propinsi adalah positif dan signifikan. Setiap kenaikan 1 persen keterbukaan pada 21 propinsi akan meningkatkan akan meningkatkan FDI sektor Jasa ke 21 propinsi tersebut rata-rata sebesar 1,573 persen (*ceteris paribus*).
3. Hubungan antara pertumbuhan Inflasi propinsi dengan pertumbuhan FDI sektor Jasa propinsi adalah negatif dan signifikan. Setiap kenaikan 1% keterbukaan

pada 21 propinsi akan menyebabkan penurunan FDI sektor Jasa ke 21 propinsi tersebut rata-rata sebesar 2,596 persen (*ceteris paribus*).

4. Hubungan antara pertumbuhan index sosial-politik propinsi dengan pertumbuhan FDI sektor Jasa propinsi adalah positif dan signifikan. Setiap kenaikan 1 persen index sosial-politik pada 21 propinsi akan meningkatkan pertumbuhan FDI sektor Jasa ke 21 propinsi tersebut rata-rata sebesar 0.626 persen (*ceteris paribus*).

6.2. Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah daerah dan *stake holder* terkait harus berupaya keras untuk menjaga stabilitas perekonomian. Harus diupayakan agar tercipta iklim usaha yang sehat, dan peningkatan pertumbuhan di sektor riil, sehingga dengannya perekonomian bertumbuh dengan baik. Pemerintah juga harus mengupayakan agar inflasi tetap terjaga.
3. Pemerintah daerah dan *stake holder* terkait harus berupaya meningkatkan Ekspor dan impor di setiap daerah masing-masing, bahkan daerah harus mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan dengan negara-negara lain dalam rangka memperkecil hambatan-hambatan perdagangan. Sehingga dengan semakin mengecilnya hambatan perdagangan, maka keterbukaan perdagangan akan meningkat dan arus masuk FDI sektor Jasa akan mengalir lebih banyak lagi.
2. Pemerintah daerah dan *stake holder* terkait harus berupaya untuk menciptakan kondisi sosial dan politik yang kondusif. Keamanan harus terjaga, dimana pihak keamanan dan pemerintah harus dapat mengupayakan agar tidak terjadi konflik sosial dan kericuhan-kericuhan masal di daerah tersebut. Perlu juga dilakukan pendidikan politik dan demokrasi yang baik bagi masyarakat agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat membuat kondisi berpolitik dan berdemokrasi yang tidak baik.

DAFTAR REFERENSI

- Appleyard, Dennis R. et. al. 2006. *International Economics*. New York: McGraw-Hill Companies.Inc.
- Arezky, Rabah, Faisal Ahmed, Norbert Funke. 2005. *The Composition of Capital Flow : Is South Africa Different?*. International Monetary Fund Working Papers, WP/05/04.
- Arthur J. Keown, et. al. 1999. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, alih bahasa oleh Chaerul D. Djakman. Jakarta: Salemba Empat.
- Bodie Zvie, Alex Kane, Alan J. Markus. 2002. *Investments*. New York. McGraw Hill.
- Baltagi Badi H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*, 3rd Editon, Great Britain:British Library Cataloguing in Publication Data.
- Dit. Binus & PP. 2005. *Sosialisasi Perdagangan Jasa*. Jakarta: Dit Binus & PP, Departemen Perdagangan.
- Dit. Binus & PP. 2006. *Pembinaan Usaha Jasa Perdagangan*. Jakarta: Dit Binus & PP, Departemen Perdagangan.
- Gujarati, Damodar. 2004. *Basic Econometrics*, third edition. New York: McGraw-Hill.
- Hadi, Hamdy, Dr. 2000. *Ekonomi Internasional : Teori Dan Kebijakan Keuangan Internasional, jilid 2*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hossain, Akhtar. 1998. *Open Macro Economics for Developing Countries*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

Investor daily, 17 November 2005.

Keown, Arthur J. et. al. 1999. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, alih bahasa oleh Chaerul D. Djakman. Jakarta: Salemba Empat.

KPPOD Research Team. 2005. *Investments Competitiveness of Regencies/Cities in Indonesia*. KPPOD.

Mishkin, Frederic S. 2001. *The Economy of Money, Banking, and Financial Market*, 6th Edition. Addison Wesley.

Nachrowi, Nachrowi D. 2006. *Pendekatan Polular dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisa Ekonomi dan keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

Shakirani, Mohd Saharudin, Zainal Zairy, Sahlan Rizaudin. 2002. *Hipotesis Pertumbuhan Ekonomi Pacuan FDI : Uji Sebab-akibat (Causality) di Malaysia*. Journal Management University Malaya, No. 223.

Rajagukguk, Erman, dkk. 2006. *Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Penanaman Modal*. Jakarta: CSIS.

Sapriannoor, Ahmad. S. 2006. *Studi Empiris Terhadap Faktor-faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Penanaman modal Asing Langsung di Indonesia*. Tesis Magister tidak diterbitkan. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sarwedi, *Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor Yang Mempengaruhinya*, dalam *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 4 No. 1.

Tim BPS. 2007. *Pendapatan Nasional Indonesia*. Jakarta: BPS.

Todaro, Michael. 2000. *Economic Development*. Adison Wesley Longman.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

WEF (2007), *The Global Competitiveness Report 2007-2008*, Geneva: World Economic Forum.

Woolridge M Jeffery, 2005. *Introductory Econometric Modern Approach*.

Wu, Yanrui. 1999. *Foreign Direct Investment and Economic Growth in China*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

www.going-global.com/articles/understanding_foreign_direct_investment.htm

www.bi.go.id

www.wto.org

Zvie Bodie, and Alex Kane, Alan J. Markus. 2002. *Investments*. New York: McGraw Hill.

LAMPIRAN

Pemilihan model

1. Pooled Least Squares Model

Dependent Variable: LOG(FDITER?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 11/14/08 Time: 21:23

Sample: 2003 2005

Included observations: 3

Cross-sections included: 21

Total pool (balanced) observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-72.85449	38.29841	-1.902285	0.0621
LOG(PDRB?)	1.999174	0.286704	6.972965	0.0000
LOG(OPEN?)	1.309096	0.776393	1.686126	0.0971
LOG(INFL?)	8.114754	7.132449	1.137723	0.2599
LOG(SOSPOL?)	-1.034135	1.246049	-0.829931	0.4100

R-squared	0.631893	Mean dependent var	15.54114
Adjusted R-squared	0.606506	S.D. dependent var	3.399169
S.E. of regression	2.132268	Akaike info criterion	4.428288
Sum squared resid	263.7008	Schwarz criterion	4.598378
Log likelihood	-134.4911	F-statistic	24.89071
Durbin-Watson stat	0.078017	Prob(F-statistic)	0.000000

- Uji F

Ho: Pooled

H1: Fixed effect

Ftable			Fstat	Hasil	
$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.10$		F stat > F table	Ho tidak diterima
3.83	2.61	2.09	24.89071		

Dengan demikian Ho ditolak, maka dalam model yang digunakan adalah fixed effect.

2. Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(FDITER?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 11/14/08 Time: 21:30

Sample: 2003 2005

Included observations: 3

Cross-sections included: 21

Total pool (balanced) observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-55.27685	59.40424	-0.930520	0.3580
LOG(PDRB?)	4.038100	2.815397	1.434291	0.1597
LOG(OPEN?)	1.689102	0.873159	1.934473	0.0605
LOG(INFL?)	-3.302118	1.599067	-2.065028	0.0458
LOG(SOSPOL?)	0.609515	0.238323	2.557515	0.0147
Fixed Effects (Cross)				
_SUMUT--C	-0.334998			
_SUMBAR--C	2.763990			
_RIAU--C	2.468585			
_SUMSEL--C	-3.275302			
_LAMPUNG--C	-0.593088			

_DKIJAKARTA-C	-2.252160
_JABAR-C	-2.749279
_BANTEN-C	0.817693
_JATENG-C	-3.571915
_DIY-C	5.467421
_JATIM-C	-5.204125
_BALI-C	-4.093317
_KALBAR-C	0.678585
_KALTIM-C	-1.828424
_SULUT-C	6.877847
_SULSEL-C	-1.817593
_NTB-C	2.996694
_SULTRA-C	2.761511
_NTT-C	0.471707
_KALSEL-C	-1.332819
_JAMBI-C	1.748988

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995538	Mean dependent var	15.54114
Adjusted R-squared	0.992721	S.D. dependent var	3.399169
S.E. of regression	0.290016	Akaike info criterion	0.650341
Sum squared resid	3.196152	Schwarz criterion	1.500791
Log likelihood	4.514266	F-statistic	353.2972
Durbin-Watson stat	1.757454	Prob(F-statistic)	0.000000

- Likelihood ratio

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: HASILBAGUSGUSGUS

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	154.860844	(20,38)	0.0000
Cross-section Chi-square	278.010651	20	0.0000

Dari hasil run likelihood ratio:

Ho: Pooled

H1: Fixed effect

	Chi-square test	Chi-square table		Hasil	Kesimpulan
LR	278.010651	$\alpha = 0.01$	13.2767	Chisquare test > chisquare table	Ho Tidak Diterima
		$\alpha = 0.05$	9.48773		
		$\alpha = 0.10$	7.77944		
					Fixed effect

3. Random Effect Model

Dependent Variable: LOG(FDITER?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/14/08 Time: 21:41

Sample: 2003 2005

Included observations: 3

Cross-sections included: 21

Total pool (balanced) observations: 63

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-15.39167	12.24442	-1.257036	0.2138
LOG(PDRB?)	2.091576	0.455789	4.588917	0.0000
LOG(OPEN?)	1.573689	0.745399	2.111203	0.0391
LOG(INFL?)	-2.596053	1.383976	-1.875793	0.0657
LOG(SOSPOL?)	0.626399	0.233290	2.685065	0.0094

Random Effects (Cross)

_SUMUT--C	0.923420
_SUMBAR--C	1.737187
_RIAU--C	3.497977
_SUMSEL--C	-3.143918
_LAMPUNG--C	-1.430506
_DKIJAKARTA--C	1.417887
_JABAR--C	0.549600
_BANTEN--C	1.341798
_JATENG--C	-1.328453
_DIY--C	3.528545
_JATIM--C	-1.827807
_BALI--C	-0.746417
_KALBAR--C	-0.605436

_KALTIM--C	-0.296522
_SULUT--C	4.345457
_SULSEL--C	-2.134060
_NTB--C	0.880067
_SULTRA--C	-0.730746
_NTT--C	-2.490153
_KALSEL--C	-2.735662
_JAMBI--C	-0.752257

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	2.276543	0.9840
Idiosyncratic random	0.290016	0.0160

Weighted Statistics

R-squared	0.553743	Mean dependent var	1.139979
Adjusted R-squared	0.522966	S.D. dependent var	0.412353
S.E. of regression	0.284803	Sum squared resid	4.704529
F-statistic	17.99245	Durbin-Watson stat	1.230211
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.615698	Mean dependent var	15.54114
Sum squared resid	275.3027	Durbin-Watson stat	0.021023

- Hausman test

H0 : Random Effect

H1 : Fixed Effect

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: HASILBAGUSGUSGUS

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.933536	4	0.7480

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(PDRB?)	4.038100	2.091576	7.718718	0.4835
LOG(OPEN?)	1.689102	1.573689	0.206786	0.7996
LOG(INFL?)	-3.302118	-2.596053	0.641625	0.3781
LOG(SOSPOL?)	0.609515	0.626399	0.002374	0.7289

Dari hasil run hausman test:

Chi-square test	Chi-square table		Hasil		Kesimpulan
1.933536	$\alpha = 0.01$	13.2767	Chisquare test < chisquare table	Ho Diterima	Random effect
	$\alpha = 0.05$	9.48773			
	$\alpha = 0.10$	7.77944			

6. Model Akhir Yang digunakan

Dependent Variable: LOG(FDITER?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/14/08 Time: 21:49

Sample: 2003 2005

Included observations: 3

Cross-sections included: 21

Total pool (balanced) observations: 63

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-15.39167	12.24442	-1.257036	0.2138
LOG(PDRB?)	2.091576	0.455789	4.588917	0.0000
LOG(OPEN?)	1.573689	0.745399	2.111203	0.0391
LOG(INFL?)	-2.596053	1.383976	-1.875793	0.0657
LOG(SOSPOL?)	0.626399	0.233290	2.685065	0.0094
Random Effects (Cross)				
_SUMUT--C	0.923420			
_SUMBAR--C	1.737187			
_RIAU--C	3.497977			
_SUMSEL--C	-3.143918			
_LAMPUNG--C	-1.430506			
_DKIJAKARTA--C	1.417887			
_JABAR--C	0.549600			
_BANTEN--C	1.341798			
_JATENG--C	-1.328453			
_DIY--C	3.528545			
_JATIM--C	-1.827807			
_BALI--C	-0.746417			

_KALBAR--C	-0.605436
_KALTIM--C	-0.296522
_SULUT--C	4.345457
_SULSEL--C	-2.134060
_NTB--C	0.880067
_SULTRA--C	-0.730746
_NTT--C	-2.490153
_KALSEL--C	-2.735662
_JAMBI--C	-0.752257

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	2.276543	0.9840
Idiosyncratic random	0.290016	0.0160

Weighted Statistics

R-squared	0.553743	Mean dependent var	1.139979
Adjusted R-squared	0.522966	S.D. dependent var	0.412353
S.E. of regression	0.284803	Sum squared resid	4.704529
F-statistic	17.99245	Durbin-Watson stat	1.230211
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.615698	Mean dependent var	15.54114
Sum squared resid	275.3027	Durbin-Watson stat	0.021023
